

**PELAKSANAAN PROGRAM DANA  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
PADA SEKOLAH DASAR DI KOTAMADYA JAKARTA TIMUR  
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA**



**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan  
studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Universitas Indonesia

Oleh :  
**VIRGO RITA KURNIASIH**  
NPM : 6604292273

**MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA**

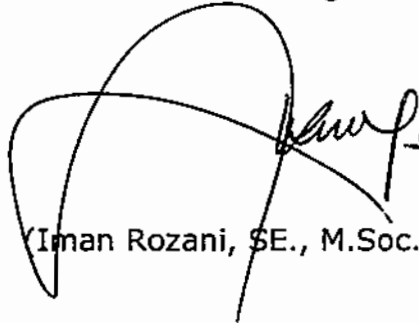
**DEPOK, 2008**

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : VIRGO RITA KURNIASIH  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 24 Agustus 1978  
NPM : 6604292273  
Judul Tesis : PELAKSANAAN PROGRAM DANA BANTUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA  
SEKOLAH DASAR DI KOTAMADYA JAKARTA  
TIMUR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHINYA

Jakarta, Januari 2008


Menyetujui  
Pembimbing



(Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc)

Mengetahui :  
Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik  
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Ketua Program Studi



( Dr. B. Raksaka Mahi )  
NIP. 131.923.199

Virgo Rita Kurniasih  
6604292273

**PELAKSANAAN PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR DI KOTAMADYA JAKARTA  
TIMUR**

**Abstraksi**

*Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan. Kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk terutama penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memperoleh pendidikan. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program BOS yang dimulai pada Juli 2005, bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiah serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.*

*Permasalahan muncul ketika program BOS berjalan beberapa waktu dengan timbulnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan program BOS ini. Timbulnya pro dan kontra tersebut karena adanya indikasi bahwa program BOS tidak terlaksana dengan baik atau tidak efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini dilakukan untuk meneliti pelaksanaan program BOS dengan melihat tingkat keberhasilan yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja tersebut menghasilkan sekolah yang berhasil dan sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Kemudian analisis regresi logistik dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membedakan atau yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BOS diantara kedua kategori sekolah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program BOS dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua murid dan besarnya SPP/iuran. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua murid maka semakin tinggi probabilitas suatu sekolah berhasil dalam pelaksanaan program BOS, dan semakin tinggi SPP/iuran maka semakin kecil probabilitas suatu sekolah berhasil dalam pelaksanaan program BOS.*

ix + 82 halaman + 6 lampiran (2008)

Kata Kunci : *Program BOS (1), Indikator Kinerja (2), Analisis Regresi Logistik (3).*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kepada Allah atas segala berkah dan rahmatnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis ini berjudul : *"Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar di Kotamadya Jakarta Timur"* disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

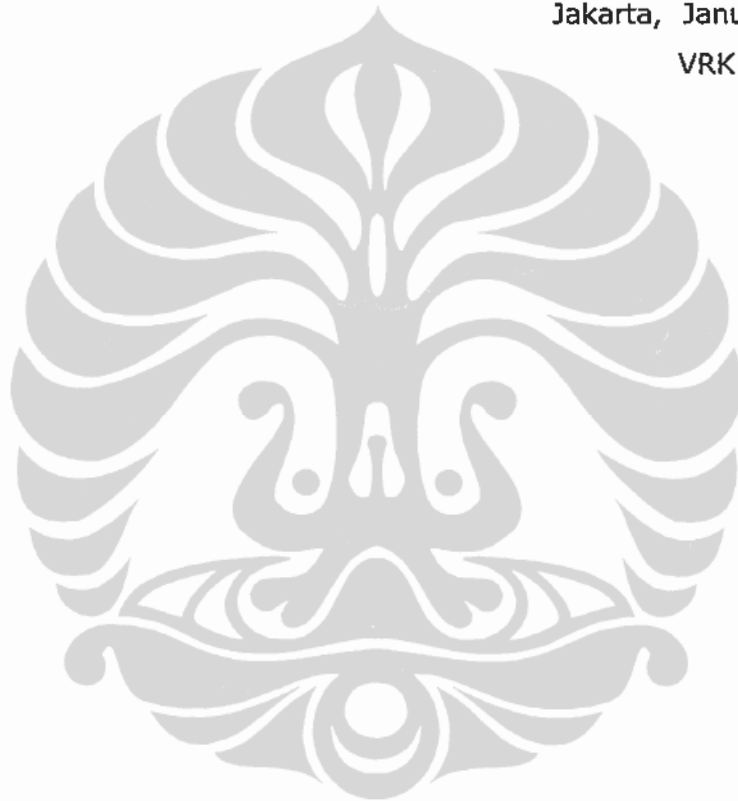
Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Lembaga Sandi Negara RI, atas beasiswa yang telah diberikan oleh penulis sehingga penulis dapat melanjutkan studi ini;
2. Bapak Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc, atas bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh kesabaran;
3. Seluruh Dosen dan staf pengajar lainnya, atas bimbingan dan arahan baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. Seluruh jajaran pejabat dan staf Sudin Dikdas Kotamadya Jakarta Timur, atas bantuan dan kemudahan untuk memperoleh data;
5. Seluruh Pejabat Lembaga Sandi Negara RI dan Rekan-rekan Bagian Perencanaan, atas dukungan yang telah diberikan;
6. Seluruh rekan-rekan MPKP angkatan XII Sore, atas dukungan, saran dan motivasinya;
7. Bapak, Ibu, Adikku Novan, Papi dan Mami, atas dukungan, pengertian dan do'anya;
8. Suami dan ananda tercinta, Dony Harso, S.IP dan Annisa Daffa Tsabita, atas cinta, do'a, dukungan, saran dan motivasi yang diberikan;
9. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala dukungan dan perhatiannya selama studi hingga penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan, untuk itu penulis mohon maaf dan menerima segala masukan serta saran atas tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Jakarta, Januari 2008

VRK

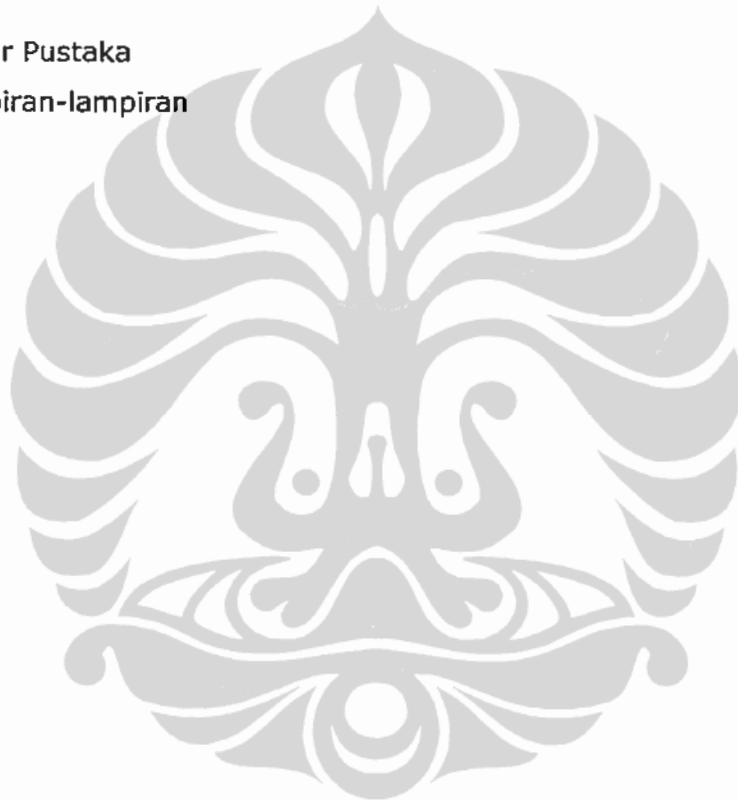


## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	i
Abstraksi .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Bagan .....	viii
Daftar Diagram .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Ruang Lingkup .....	6
1.6. Hipotesis Penelitian .....	6
1.7. Metodologi Penelitiann .....	7
1.8. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN TEORITIS</b>	
2.1. Teori Ekonomi Publik .....	11
2.2. Studi Sebelumnya tentang Pelaksanaan Program BOS .....	17
<b>BAB III : PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH</b>	
3.1. Arti Pendidikan dan Pembangunan .....	22
3.2. Program Bantuan Operasional .....	34
3.2.1. Ketentuan Sekolah Penerima Dana BOS ...	36
3.2.2. Mekanisme Pelaksanaan .....	37
3.2.3. Penggunaan Dana BOS .....	41
3.2.4. Organisasi Pelaksana .....	43
3.2.5. Pertanggungjawaban Keuangan .....	49
3.2.6. Monitoring dan Evaluasi .....	50

<b>BAB IV</b>	<b>: METODOLOGI DAN HASIL PENELITIAN</b>	
4.1.	Metodologi Penelitian .....	54
4.2.	Gambaran Sampel .....	69
4.3.	Hasil Analisis Regresi Logistik .....	73
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
5.1.	Kesimpulan .....	81
5.2.	Saran .....	81

Daftar Pustaka  
Lampiran-lampiran



## DAFTAR TABEL

1.1.	Data Kependudukan DKI Jakarta Tahun 2000 .....	4
1.2.	Data dan Informasi Kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2003 ... .	5
1.3.	Indikator Penilaian Program BOS .....	8
3.1.	Nilai Minimum dan Maksimum IPM .....	25
3.2.	Pembiayaan Pendidikan dalam Anggaran Pembiayaan Nasional 2003 .....	26
3.3.	Aspek dan Penilaian Kinerja Program BOS .....	52
4.1.	Nama Sekolah Sampel .....	55
4.2.	Kategori Sekolah Dasar Sampel .....	60
4.3.	Tingkat Pendidikan Responden .....	69
4.4.	Media Informasi Program BOS .....	70
4.5.	Frekuensi Sosialisasi Program BOS .....	70
4.6.	Tingkat Transparansi Penggunaan Dana BOS .....	71
4.7.	Iteration History I .....	73
4.8.	Omnibus Tests of Model Coefficients I .....	74
4.9.	Model Summary I .....	74
4.10.	Classification Table I .....	75
4.11.	Variable in the Equation I .....	75
4.12.	Iteration History II .....	77
4.13.	Omnibus Tests of Model Coefficients II .....	78
4.14.	Model Summary II .....	78
4.15.	Classification Table II .....	78
4.16.	Variable in the Equation II .....	79



## DAFTAR BAGAN

3.1. Alur Pengiriman Data Jumlah Siswa .....	38
3.2. Alur Alokasi dan Seleksi .....	40
3.3. Mekanisme Penyaluran Dana BOS .....	40



## DAFTAR DIAGRAM

2.1. Eksternalitas Negatif .....	16
2.2. Eksternalitas Positif .....	17



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya negara tersebut, baik itu sumber daya fisik atau kekayaan alam, maupun sumber daya manusia seperti jumlah penduduk dengan tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar kehidupan seorang manusia. Melalui pendidikan, seorang manusia dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi *sesuatu* yang mempunyai arti atau nilai melalui pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) yang dimilikinya.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara sangat menentukan posisi negara tersebut di antara negara-negara lain di dunia. Pendidikan berperan dalam peningkatan kualitas SDM itu sendiri, terutama dari aspek produktivitas pekerja sebab tenaga kerja yang semakin terdidik akan menghasilkan output yang semakin baik. Selain itu pendidikan juga berperan menciptakan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai krisis yang terjadi. Hal ini dibuktikan oleh Cina dan Thailand yang lebih cepat bangkit dari keterpurukan akibat krisis ekonomi tahun 1997. Pada dunia yang selalu berubah saat ini suatu negara dituntut untuk dapat mencapai kemandirian. Kemandirian merupakan sumber dari kemampuan suatu bangsa untuk bertahan dalam lingkungan yang berubah, baik lingkungan dalam masyarakat maupun lingkungan antar bangsa, tanpa mengorbankan jati diri negara tersebut.

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 salah satunya mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam melaksanakan amanat tersebut Pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Wajib belajar Pendidikan Dasar (Wajar Diknas) Sembilan Tahun yang digalakkan pemerintah sejak tahun 1994 merupakan salah satu program pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan negara. Sejak Tahun Ajaran (TA) 1998/1999 hingga 2002/2003, Pemerintah memberikan beasiswa bagi murid miskin melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan. Program ini dirancang untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Setelah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2001, Pemerintah juga memberikan beasiswa melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan yang dikenal dengan sebutan Bantuan Khusus Murid (BKM).

Pengurangan subsidi pada Maret 2005 dan Oktober 2005 menyebabkan Pemerintah mengubah kosep dan rancangan PKPS-BBM Bidang Pendidikan untuk tingkat SD dan SMP secara mendasar sejak TA 2005/2006. Program BKM untuk tingkat SD dan SMP diubah menjadi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perbedaannya adalah Program BKM diberikan langsung kepada murid miskin yang dipilih oleh sekolah sesuai alokasi yang diterimanya sedangkan Program BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan besaran dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Berdasarkan berbagai program kebijakan di bidang pendidikan menunjukkan perhatian pemerintah berupa peningkatan jumlah anggaran setiap tahunnya sehingga sampai

pada akhirnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% yaitu lebih dari Rp. 100 trilyun yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2006 sebesar Rp. 647,667 trilyun. Dengan anggaran tersebut diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat ditingkatkan.

Seiring dengan pelaksanaan program BOS yang dicanangkan Juli 2005, ada beberapa pendapat baik individu atau kelompok/kelembagaan yang menyatakan pro dan kontra terhadap pelaksanaan program BOS tersebut. Menurut Rohendi<sup>1</sup>, Program BOS mengindikasikan tidak terlaksana dengan baik atau tidak efektif seperti program yang terdahulu. Hal itu terjadi karena :

- salah mengestimasi unit cost pendidikan. Seperti yang dikemukakan Sahrizal Marta Tanjung (Kompas, 21 Maret 2005), bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Depdiknas yang didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Statistik Nasional pada tahun 2003 itu sangat jauh dari realita kebutuhan rata-rata biaya pendidikan saat ini. Berdasarkan catatan dan pengalaman kasus pendidikan di Medan oleh Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR), unit cost yang dibutuhkan untuk setiap SD minimal Rp. 79.766 per bulan, sementara untuk tiap siswa SMP minimal Rp. 119.693 per bulan, dan untuk setiap siswa SMA minimal Rp. 185.460 per bulan.
- Kurang tepatnya perhitungan mengenai jumlah orang miskin.
- Kebiasaan buruk yang sudah menjadi *trade mark* bangsa seperti korupsi dan suap.
- Penyaluran dana yang salah sasaran. Bukan rahasia lagi banyak sekolah yang kaya, terutama sekolah negeri yang notabene dihuni oleh siswa-siswa dari kalangan borjuis,

---

<sup>1</sup> Kompas, 26 September 2005.

kebanjiran subsidi. Sementara orang miskin (bagian terbesar sekolah di Indonesia), terutama sekolah swasta dan sekolah di pelosok yang rata-rata dihuni oleh siswa dari rakyat jelata, pemerintah memberikan dana yang minim.

Berdasarkan indikasi ketidakefektifan program BOS yang dikemukakan oleh Rohendi tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan program BOS dengan melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan program BOS di masing-masing sekolah dasar berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan.

Penelitian tentang keberhasilan pelaksanaan program BOS ini akan dilaksanakan pada Sekolah Dasar (SD) yang merupakan jenjang pendidikan formal pertama, karena peneliti menilai bahwa keberhasilan pelaksanaan program BOS di sekolah tingkat dasar sangat penting dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BOS di sekolah tingkat lanjutan. Sedangkan untuk wilayah penelitian, peneliti memilih Kotamadya Jakarta Timur karena Kotamadya Jakarta Timur merupakan kotamadya yang mempunyai jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi dibandingkan keempat kotamadya lainnya di DKI Jakarta (Tabel 1.1.).

Tabel 1.1. Data Kependudukan DKI Jakarta Tahun 2000

Kotamadya/ Kabupaten	Data Kependudukan Tahun 2000			
	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku	Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Jakarta Selatan	1.784.044	-0,72	17.464.544	97,69
2. Jakarta Timur	2.347.917	8,47	14.973.698	96,77
3. Jakarta Pusat	874.595	-2,21	52.561.061	98,84
4. Jakarta Barat	1.904.191	0,45	15.680.916	97,77
5. Jakarta Utara	1.436.336	0,49	25.082.731	98,40
DKI Jakarta	8.347.083	0,11	22.425.675	97,70

Sumber : Diolah dari Survei Modul Kependudukan SP 2000, BPS

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan PDRB dan garis kemiskinan yang terendah (Tabel 1.2.) merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kemampuan masyarakat terhadap pendidikan juga rendah, hal ini terlihat dari angka partisipasi sekolah yang rendah pada Kotamadya Jakarta Timur.

Tabel 1.2. Data dan informasi kemiskinan DKI Jakarta Tahun 2003

Kotamadya/Kabupaten (1)	Garis kemiskinan(Rp/kap/bulan) (2)
1. Jakarta Selatan	190 783
2. Jakarta Timur	183 369
3. Jakarta Pusat	185 369
4. Jakarta Barat	188 110
5. Jakarta Utara	186 749

Sumber : Data dan informasi kemiskinan tahun 2003, Buku 2 : Kabupaten, BPS, Jakarta, 2003, hal. 6

## 1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti mencoba merumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan program BOS pada sekolah dasar di Kotamadya Jakarta Timur ? Sekolah mana saja yang termasuk pada kategori sekolah yang berhasil dan sekolah mana saja yang termasuk pada kategori sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS ?
- b. Faktor-faktor apa saja yang membedakan/mempengaruhi antara sekolah dasar yang berhasil dengan sekolah dasar yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS di Kotamadya Jakarta Timur ?

## 1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah :

- a. Mengetahui sekolah dasar mana saja yang termasuk dalam kategori sekolah yang berhasil dan sekolah dasar mana saja yang termasuk dalam kategori sekolah dengan yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS di wilayah Kotamadya Jakarta Timur.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang membedakan/mempengaruhi antara sekolah dasar yang berhasil dengan sekolah dasar yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS di Kotamadya Jakarta Timur.

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat diperoleh informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan program BOS pada sekolah dasar di Kotamadya Jakarta Timur. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan kepada Pemerintah tentang pelaksanaan program BOS di kemudian hari sehingga pelaksanaan program BOS berjalan lebih baik sesuai mekanisme dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

#### **1.5. RUANG LINGKUP**

Tesis ini akan meneliti keberhasilan pelaksanaan program BOS pada Sekolah Dasar di wilayah Kotamadya Jakarta Timur.

#### **1.6. HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis penelitian ini adalah:

- a. Karakteristik sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS apabila dibandingkan dengan sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS adalah : dana BOS yang lebih tinggi, frekuensi sosialisasi yang lebih tinggi, tingkat transparansi yang lebih tinggi, SPP/Iuran yang lebih rendah dan tingkat pendidikan orang tua yang lebih tinggi dan penyaluran dana BOS yang tepat waktu dan tepat jumlah.



- b. Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah besarnya dana BOS, karena dengan semakin banyaknya murid yang menerima dana BOS maka semakin banyak pula dana BOS yang diperoleh sekolah tersebut sehingga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diatur dalam Buku Panduan BOS dengan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sekolah yang mendapat dana BOS yang lebih sedikit.

### **1.7. METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah mengkategorikan sekolah berdasarkan pengukuran kinerja dengan indikator-indikator kinerja keberhasilan program BOS. Setelah pengkategorian sekolah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui variabel-variabel bebas yang mana saja yang mempengaruhi dan membedakan antara kategori sekolah yang berhasil dan sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS.

#### **a. Mengkategorikan sekolah**

Langkah pertama yang dilakukan untuk mengkategorikan sekolah mana saja yang termasuk kategori sekolah berhasil dan kategori sekolah tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS adalah dengan melakukan penilaian untuk masing-masing sekolah berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam rangka melaksanakan penilaian keberhasilan pelaksanaan program BOS adalah :

- Persentase penyerapan dana;
- SPP/iuran;
- Peningkatan sarana dan prasarana;
- Pembiayaan kegiatan kesiswaan.

Setelah menetapkan indikator-indikator kinerja keberhasilan pelaksanaan program BOS tersebut maka langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap kinerja program BOS berdasarkan indikator-indikator tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 1.3. Indikator dan Penilaian Keberhasilan Program BOS

NO	INDIKATOR	HASIL PENILAIAN	Nilai	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
1	PENYERAPAN DANA	100%	1	0	1
		<100%	0		
2	SPP/Iuran	Ada	0	0	1
		Tidak Ada	1		
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Ada	1	0	1
		Tidak Ada	0		
4	Pembiayaan kegiatan kesiswaan	Gratis	1	0	1
		Tidak	0		
				0	4

Setelah penilaian dilakukan maka selanjutnya adalah mengkategorikan masing-masing sekolah berdasarkan nilai yang diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nilai yang diperoleh 0 s/d 2 maka masuk pada kategori 0;
- Nilai yang diperoleh 3 s/d 4 maka masuk pada kategori 1.

Kategori 0 merupakan kategori sekolah tidak berhasil sedangkan kategori 1 merupakan kategori sekolah berhasil dalam pelaksanaan BOS. Pengkategorian ini dilakukan untuk mengolah data selanjutnya yaitu dengan analisis regresi logistik.

#### b. Analisis Regresi Logistik

Analisa regresi logistik digunakan untuk mengetahui variabel-variabel bebas mana saja yang mempengaruhi atau membedakan antar kelompok (variabel terikat). Variabelbebas yang digunakan pada analisa regresi logistik merupakan campuran antara variabel kontinyu atau variabel

metrik dan variabel kategorikal atau variabel non metrik. Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Imam Ghozali, 2005). Pada penelitian ini analisis regresi logistik juga digunakan untuk mengetahui probabilitas sekolah dikategorikan sebagai sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS berdasarkan variabel-variabel bebas yang telah dipilih/ditetapkan.

## **1.8. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan penelitian ini akan tersusun ke dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan Penelitian
- 1.4. Manfaat Penelitian
- 1.5. Ruang Lingkup
- 1.6. Hipotesis Penelitian
- 1.7. Metodologi
- 1.8. Sistematika Penulisan

### **BAB II TINJAUAN TEORITIS**

- 2.1. Teori Ekonomi Publik
- 2.2. Studi Sebelumnya tentang Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah

### **BAB III KAJIAN LITERATUR TENTANG PENDIDIKAN DAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH**

- 3.1. Arti Pendidikan dan Pembangunan
- 3.2. Program Bantuan Operasional Sekolah
  - 3.2.1. Ketentuan Sekolah Penerima BOS

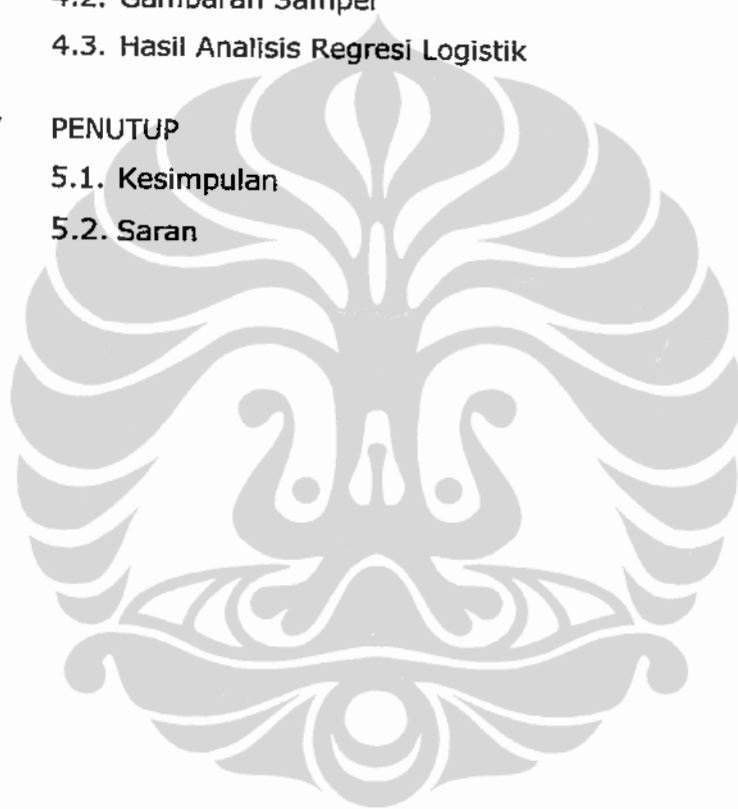
- 3.2.2. Mekanisme Pelaksanaan
- 3.2.3. Penggunaan Dana BOS
- 3.2.4. Organisasi Pelaksana
- 3.2.5. Pertanggungjawaban Keuangan
- 3.2.6. Monitoring dan Evaluasi

**BAB IV METODOLOGI DAN HASIL PEMBAHASAN**

- 4.1. Metodologi Penelitian
- 4.2. Gambaran Sampel
- 4.3. Hasil Analisis Regresi Logistik

**BAB V PENUTUP**

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **2.1. TEORI EKONOMI PUBLIK**

##### **2.1.1. FUNGSI PEMERINTAH**

Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai 3 (tiga) fungsi dalam sistem perekonomian kapitalis murni, yaitu :

- a. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan
- b. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan
- c. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada satu pun negara kapitalis di dunia ini yang melaksanakan sistem kapitalis murni, dimana pemerintah di dunia modern mempunyai peranan yang semakin besar dalam mengatur jalannya perekonomian. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktek menghadapi perbenturan kepentingan, karena tidak adanya koordinasi yang menimbulkan harmonis dalam kepentingan masing-masing individu. Disinilah pemerintah mempunyai peranan untuk memperbaiki atau mengarahkan aktivitas perekonomian. Oleh karena itu perekonomian tidak sepenuhnya diatur oleh pihak swasta. Dalam perekonomian modern, peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan besar, yaitu :

- peranan alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi
- peranan distribusi pendapatan atau kekayaan, dan
- peranan stabilisasi perekonomian.

---

<sup>1</sup> Mangkoesoebroto, Dr.Guritno, M.Ec, Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, BPFE-Yogyakarta, 1993, hal.1

## 2.1.2. BARANG PUBLIK

### 1. Definisi

Barang dan jasa tidak semuanya dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut barang publik. Barang publik mempunyai 2 (dua) karakteristik, yaitu :

- bersifat non rival (*non rivalry*)

Barang yang bersifat non rival adalah barang yang dapat dikonsumsi bersamaan pada waktu yang sama (*joint consumption*), tanpa saling meniadakan manfaat.

- bersifat non eksklusif (*non exclusive*)

Non eksklusif mengandung arti bahwa seseorang tidak perlu membayar untuk menikmati manfaat barang publik.

Tidak semua barang publik mempunyai sifat non rival dan non eksklusif. Barang publik yang mempunyai unsur privat dan publik pada satu barang disebut barang publik semu (*quasy publik goods*). Ada 2 (dua) kemungkinan barang publik semu, yaitu :

- bersifat rival dan non eksklusif

Barang yang mempunyai kedua sifat ini berarti tidak dapat dikonsumsi bersamaan (*rival*) namun untuk menikmatinya tidak harus membayar (*non eksklusif*).

- bersifat non rival dan eksklusif

Barang yang mempunyai kedua sifat ini berarti dapat dikonsumsi bersamaan (*non rival*) tetap untuk menikmatinya harus membayar.

### 2. Masalah-masalah dalam Penyediaan Barang Publik

Ada beberapa masalah pokok dalam penyediaan barang publik, yaitu<sup>2</sup> :

---

<sup>2</sup> Prathama Raharja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar, Edisi Revisi, LPEM-FEUI, 2002, hal. 252

a. Pengukuran Permintaan Barang Publik

Persepsi seseorang atau kelompok masyarakat terhadap barang publik sangat dipengaruhi banyak faktor yang sifatnya subyektif sehingga sulit mengukurnya akibatnya sulit juga menentukan jumlah barang publik yang efisien.

b. Pendanaan

Jumlah dana yang dibutuhkan sama dengan total manfaat marginal yang dinikmati oleh seluruh masyarakat. Salah satu cara yang lebih baik adalah beban yang harus ditanggung oleh pemerintah.

c. Penyediaan dan Produksi Barang Publik

Tidak bekerjanya mekanisme pasar persaingan sempurna menyebabkan penyediaan barang publik (*public goods provision*) menjadi monopoli pemerintah. Setidaknya untuk jenis barang publik tertentu. Walaupun pemerintah yang menyediakan, tetapi produksi barang publik (*public goods production*) tidak harus pemerintah. Mungkin lebih efisien bila diserahkan kepada swasta.

Contoh barang yang mempunyai sifat non rival dan eksklusif adalah sekolah, dimana semua orang dapat mengkonsumsinya secara bersamaan sesuai dengan kapasitas tempat duduk yang ada di semua kelas di sekolah tersebut (non rival) akan tetapi untuk dapat menikmati jasa sekolah di dalam memberikan pendidikan maka kita harus membayarnya (eksklusif). Uang yang kita bayarkan tersebut sebagai balas jasa yang telah diberikan sekolah yang kemudian akan digunakan oleh pihak sekolah untuk membayar biaya operasionalnya seperti membayar tenaga pendidik/guru, membeli alat tulis kantor dan peralatan yang mendukung proses belajar mengajar,

membayar langganan daya dan jasa seperti telpon, listrik dan air, pemeliharaan dan perawatan sekolah dan masih banyak lagi biaya operasional lainnya.

Permasalahan yang timbul adalah tidak semua orang atau lapisan masyarakat mempunyai kemampuan yang sama untuk membayar biaya sekolah tersebut. Bagi masyarakat yang mampu dapat memilih sekolah mana saja yang dirasakan memberikan pelayanan yang setimpal dengan yang mereka bayarkan sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu tidak dapat menikmati jasa sekolah manapun karena tidak mampu membayarnya.

Penyediaan sekolah bagi masyarakat yang tidak mampu merupakan tugas pemerintah karena tidak ada pihak swasta yang bersedia menyediakan fasilitas tersebut. Pihak swasta selain berorientasi untuk mendapatkan laba atau keuntungan yang maksimal dan harus menutup biaya operasional yang sudah dikeluarkan dalam pengelolaan suatu sekolah, merupakan alasan utama untuk tidak menyediakan fasilitas sekolah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu tersebut. Oleh karena itu pemerintah menyediakan barang publik dalam kasus ini adalah sekolah atau menyediakan dana operasional sekolah karena sistem pasar gagal dalam menyediakan barang atau jasa tersebut.

Pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 menimbulkan kekhawatiran pemerintah terhadap upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun. Pengurangan subsidi tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan semakin sulitnya untuk memperoleh akses untuk memperoleh pendidikan bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu karena menurunnya kemampuan daya beli masyarakat tersebut. Berdasarkan latar belakang itu, pemerintah melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak



(PKPS-BBM) bidang pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### 2.1.3. EKSTERNALITAS

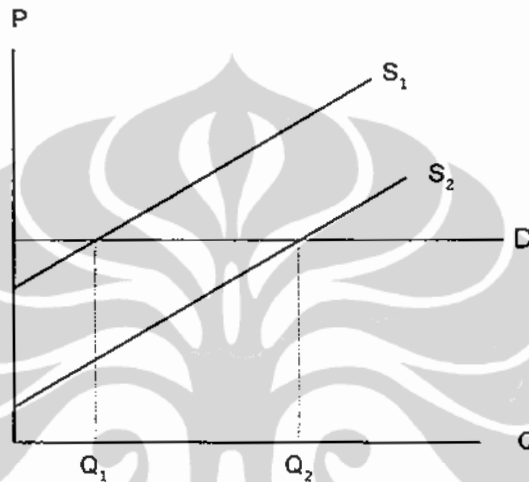
Dengan adanya kebijakan pemerintah melaksanakan program BOS memberikan dampak terhadap masyarakat. Dampak yang lebih dikenal dalam istilah ekonomi adalah eksternalitas dapat bersifat positif dan negatif. Eksternalitas (*externalities*) adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga pasar<sup>3</sup>. Eksternalitas negatif atau merugikan dan eksternalitas positif atau menguntungkan menyebabkan pasar tidak efisien. Pada kasus di penelitian ini, BOS tentunya mempunyai dampak positif atau merupakan eksternalitas positif terhadap masyarakat.

Misalnya untuk kasus eksternalitas negatif seperti pencemaran lingkungan atau pembuangan limbah yang dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar perusahaan tersebut yaitu terjangkitnya penyakit kulit akibat pencemaran air yang terkontaminasi oleh limbah tersebut. Pada pasar persaingan sempurna, produsen menghadapi kurva permintaan yang horisontal dan keseimbangan pasar terjadi pada  $E_0$ . Seharusnya menurut standar industri sehat, perusahaan harus mempunyai fasilitas pengolahan limbah. Tetapi perusahaan tersebut justru membuang limbah tersebut langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. Akibatnya perusahaan mampu memproduksi dengan kapasitas produksi pada penawaran  $S_2$ , sehingga keseimbangan pasar terjadi pada  $E_2$ . Hal ini terjadi karena perusahaan tidak melakukan pengolahan limbah sehingga biaya produksi

<sup>3</sup> Prathama Raharja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, LPEM-FEUI, 2002, hal. 24

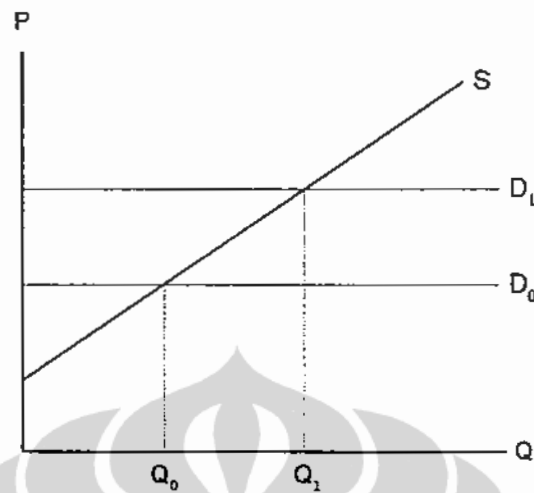
menjadi berkurang menjadikan jumlah produksi menjadi meningkat menjadi sebesar  $Q_2$ , dimana seharusnya jika perusahaan tersebut melakukan pengolahan limbah maka jumlah produksi yang dihasilkan adalah sebesar  $Q_1$ .

Diagram 2.1. Eksternalitas Negatif



Contoh untuk eksternalitas positif adalah kasus pada penelitian ini, yaitu kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program BOS memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat. Pada pasar persaingan sempurna, produsen dalam hal ini adalah pemerintah, menghadapi kurva permintaan yang horisontal dan keseimbangan pasar terjadi pada  $E_0$ . Dengan adanya program BOS maka kurva permintaan bergeser keatas ( $D_1$  ke  $D_2$ ) karena memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, dimana seharusnya pemerintah menyediakan dana untuk program BOS lebih besar lagi karena permintaan menjadi lebih besar, yaitu di  $Q_2$ .

Diagram 2.2. Ekternalitas Positif



## 2.2. STUDI SEBELUMNYA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Studi tentang pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya adalah Lembaga Penelitian SMERU. Hasil penelitian tentang pelaksanaan program BOS yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU antara lain adalah :

- a. BOS berpotensi meningkatkan akses terhadap pendidikan dasar bagi masyarakat miskin.

Diantara lima propinsi sampel kajian cepat SMERU, yaitu Jawa Timur, Banten, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan NTB, cakupan pemberian manfaat tambahan bagi siswa miskin yang terendah adalah Propinsi Banten sementara yang tertinggi adalah Propinsi Sumatera Utara. Secara total, dari semua sekolah sampel, siswa miskin yang mendapat bantuan khusus hanya sekitar 22,6% dari jumlah siswa miskin sebesar 2.907 siswa. Bantuan khusus untuk siswa miskin ini bervariasi antar sekolah antara lain berupa uang

transpor yang berkisar antara Rp. 5.000,- hingga Rp. 15.000,- per siswa per bulan, baju seragam, sepatu, alat tulis, tas atau membebaskan atau mengurangi iuran sekolah.

Walaupun dapat dipastikan bahwa semua siswa menerima manfaat program BOS, akan lebih tepat jika sekolah memberikan manfaat tambahan bagi siswa miskin. Hal ini juga dikemukakan oleh sebagian orang tua murid yang tergolong mampu. Alasan yang dikemukakan antara lain untuk lebih membantu siswa miskin agar dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Salah satu sekolah sampel telah menerapkan mekanisme penentuan siswa miskin yang cukup transparan dan bertanggung gugat. Penentuan diawali dengan pengisian data pekerja dan/atau penghasilan orang tua siswa serta penilaian wali kelas. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke rumah orang tua siswa yang diduga miskin (*home visit*) untuk verifikasi oleh tim kecil yang dibentuk sekolah. Hasilnya ada tiga macam perlakuan/pemberian manfaat : iuran siswa yang tergolong miskin dibebaskan 100%, iuran siswa yang agak miskin dikurangi 50% dan iuran siswa lainnya dikurangi Rp. 22.500,- (untuk SMP dengan dana BOS sebesar Rp. 27.500/siswa/bulan). Mekanisme inilah yang sejalan dengan tujuan program, sehingga dapat dijadikan model bagi sekolah lain dalam menentukan kebijakan pemberian manfaat tambahan bagi siswa miskin, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan akses siswa miskin terhadap pendidikan bermutu<sup>4</sup>.

b. BOS berdampak terhadap penerimaan sekolah.

Di hampir semua sekolah sampel, dana BOS meningkatkan jumlah penerimaan dana sekolah. Bagi sekolah yang memiliki jumlah murid yang banyak,

---

<sup>4</sup> Widjajanti I. Suhary & Wenefrida Widayanti, Newsletter SMERU No.19 : Jul-Sep/2006

peningkatan jumlah penerimaan dana cukup signifikan. Di sekolah yang sebelumnya mengenakan iuran sekolah lebih rendah dari dana BOS, BOS meningkatkan penerimaan dana sekolah berkali-kali lipat. Sebagai contoh, di beberapa SD sampel yang sebelumnya mengenakan iuran sekolah antara Rp. 1.000 – Rp. 5.000 per bulan, dengan dana BOS sebesar Rp. 19.583 per siswa/bulan, penerimaan sekolah meningkat kira-kira empat hingga 20 kali lipat<sup>5</sup>.

c. Peran Komite Sekolah dalam Pelaksanaan BOS.

Keterlibatan Komite Sekolah diatur pada Juklak BOS (2005) melalui peran serta komite sekolah dalam beberapa tahapan teknis program seperti : keputusan sebagai penerima BOS, pengambilan, dan perencanaan penggunaan dana BOS. Peran komite dalam pengelolaan dana BOS bersifat strategis karena merupakan ajang penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatoris yang menjadi tuntutan setiap program publik.

SMERU mengidentifikasi beberapa catatan kritis tentang keterlibatan komite sekolah dalam tahapan-tahapan teknis diatas serta proses sosialisasi program BOS kepada komite sekolah yang dinilai turut mempengaruhi kinerja komite sekolah dalam pengelolaan BOS. Lemahnya peran serta komite sekolah dalam pelaksanaan program BOS mengakibatkan kurangnya partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut.

Hal ini ditengarai sebagai akibat dari minimnya upaya sosialisasi program, baik secara formal maupun informal oleh instansi terkait dan pihak sekolah kepada komite sekolah. Karena itu, diharapkan strategi penguatan dan pemberdayaan peran komite sekolah dalam pengelolaan BOS menjadi syarat penting. Strategi ini dapat tertuang melalui

---

<sup>5</sup> Sami Bazzi, Wenefrida Widyanti & Bambang Soelaksono, Newsletter SMERU No.19 : Jul-Sep/2006

upaya penegasan peran dan fungsi komite dalam juklak secara eksplisit dan upaya sosialisasi peran komite sekolah yang lebih intensif, formal dan terarah<sup>6</sup>.

d. Dampak Program BOS terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan.

Wujud partisipasi masyarakat yang terungkap dalam kajian cepat SMERU terhadap program BOS (Suharyo, 2006) antara lain berupa :

- 1). Sumbangan orang tua murid kepada pihak sekolah, baik secara rutin (bulanan) maupun setiap ajaran baru.
- 2). Masyarakat umum, baik secara perorangan maupun melalui wadah yayasan, berinisiatif dalam mengembangkan sarana pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar, bahkan hingga ke daerah terpencil.
- 3). Dunia usaha, baik swasta maupun BUMN, telah memberikan dukungannya kepada sekolah pemerintah maupun swasta. Selain membantu pembangunan gedung dan sarana sekolah juga memberikan bantuan langsung ke sekolah dan murid berupa beasiswa terutama bagi siswa kurang mampu.

Namun, keberadaan BOS disinyalir mengakibatkan menurunnya kepedulian orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan karena melalui program BOS pemerintah terkesan telah mengambil alih tanggung jawab pengelolaan pendidikan. Indikasi ini menguat dengan adanya sosialisasi program yang terbatas dan tidak jelas sehingga

---

<sup>6</sup> Meuthia Rosfadhila & Justin Sodo, Newsletter SMERU No.19 : Jul-Sep/2006

muncul anggapan bahwa program BOS identik dengan sekolah gratis<sup>7</sup>.



---

<sup>7</sup> Sri Budiyanti & Nina Toyamah, Newsletter SMERU No.19 : Jul-Sep/2006

## BAB III

### KAJIAN LITERATUR TENTANG PENDIDIKAN DAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

#### 3.1. ARTI PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN

##### 3.1.1. Definisi Pendidikan

Peningkatan kualitas manusia Indonesia salah satunya diwujudkan dalam peningkatan pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara<sup>1</sup>.

Jalur pendidikan terdiri atas :

a. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas :

- Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

- Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan kejuruan.
- Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

---

<sup>1</sup> BAB I Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



- Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

b. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

c. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### 3.1.2. Pentingnya Kualitas SDM dalam pembangunan

Kualitas sumber daya manusia sangat berkaitan dengan masalah pembangunan, karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan suatu bangsa. Beberapa alasan pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam pembangunan nasional adalah sebagai berikut : *Pertama*, adalah semakin dirasakan perlunya berorientasi pada nilai tambah dan menghasilkan produksi nasional yang lebih kompetitif dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya memelihara dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. *Kedua*, perkembangan pembangunan yang semakin cepat dan kompleks serta perkembangan globalisasi berupa keterbukaan hubungan antarnegara baik di bidang ekonomi, industrialisasi, perdagangan, informasi serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan untuk menyiapkan sumber daya manusia sejak dini serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya

agar menjadi sumber daya manusia yang profesional, kreatif dan inovatif. *Ketiga*, proses pembangunan ekonomi Indonesia sekarang ini sedang mengalami masa transisi atau transformasi dari ekonomi yang dipengaruhi budaya agraris kepada ekonomi yang dipengaruhi oleh budaya industri dalam waktu yang relatif singkat. *Keempat*, adanya keinginan dan komitmen nasional sebagaimana disebutkan dalam GBHN 1993, bahwa manusia adalah sebagai pelaku dan sekaligus sebagai sasaran pembangunan. Jadi sebagai pelaku pembangunan manusia Indonesia merupakan salah faktor produksi yang diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa untuk seluruh masyarakat<sup>2</sup>.

### 3.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Laporan Nasional Pembangunan Manusia Indonesia 2001 berargumen bahwa, untuk konteks Indonesia saat ini, pembangunan manusia yang tercermin dari tersedianya berbagai barang publik secara luas (seperti pendidikan dasar, ketersediaan air minum yang bersih dan sehat, akses terhadap pelayanan kesehatan dan sebagainya) akan secara langsung memperkuat pondasi dari demokrasi yang baru lahir di Indonesia. Pembangunan manusia juga akan menjadi dasar yang kuat bagi pelaksanaan reformasi institusi-institusi ekonomi secara berkelanjutan yang pada akhirnya akan menciptakan kepastian hukum yang adil serta menghalangi terjadinya pemanfaatan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Semuanya merupakan komponen yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah melakukan upaya-upaya besar dalam berbagai aspek pembangunan manusia yang tingkat kemajuannya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). IPM merupakan

---

<sup>2</sup> Tjiptoherijanto, Prijono, SDM dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penerbit FEUI, 1996

ukuran keberhasilan pembangunan aspek manusia dalam suatu wilayah tertentu yang standarnya ditentukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui UNDP (United Nation of Development Program). Ukuran ini selanjutnya disepakati dan dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia pada suatu wilayah tertentu, seperti negara atau propinsi. Pada dasarnya IPM menetapkan standar-standar minimal yang sangat sederhana sehingga dapat dikatakan sebagai prasyarat minimal yang harus dicapai oleh suatu negara atau wilayah pada kurun waktu tertentu. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari : (1) Kesehatan (usia hidup), yang diukur dengan angka harapan hidup; (2) Pengetahuan, yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; (3) Standar hidup layak (pendapatan) yang diukur dengan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Lebih jauh pencapaian IPM dikonfirmasi dengan nilai minimum dan maksimum seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Nilai Minimum dan Maksimum IPM

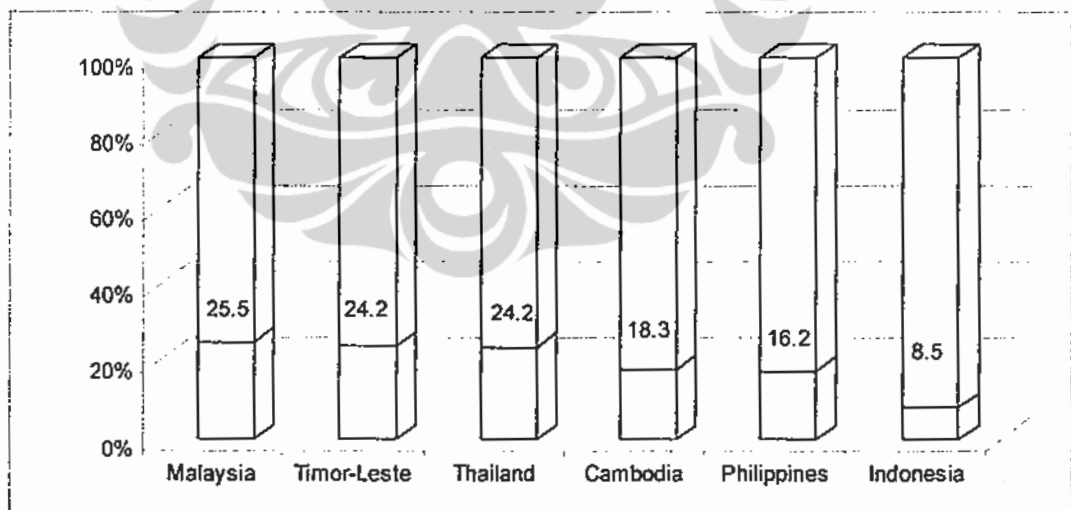
Komponen IPM	Nilai		Catatan
	Maksimum	Minimum	
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	Standar UNDP
Konsumsi per kapita yang disesuaikan	732.7201)	300.0002)	UNDP menggunakan PDB/kapita riil yang disesuaikan

Pada ketiga komponen IPM tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan mempunyai 2 (dua) alat ukur yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah jika dibandingkan dengan komponen IPM lainnya. Dari 2 (dua) alat ukur tersebut

menyatakan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting bagi keberhasilan membangun unsur manusia.

Berdasarkan Human Development Report 2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka HDI Indonesia adalah 0,692. Angka indeks tersebut merupakan komposisi dari angka harapan hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9%, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65%, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar US\$ 3.230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara (Kompas, 2004) dan dilihat dari pembiayaan pendidikan, Indonesia menempati urutan ke-6 (terakhir) jika dibandingkan dengan Malaysia, Timor Leste, Thailand, Kamboja dan Philipina.

Tabel 3.2. Pembiayaan Pendidikan dalam Anggaran Pembiayaan Nasional, 2003



#### 3.1.4. PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI

Pendidikan dalam pandangan tradisional merupakan salah satu *public service* atau jasa layanan umum dari negara

kepada masyarakat dinilai tidak memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat. Hal ini menyebabkan pembangunan pendidikan tidak menarik untuk menjadi tema perhatian dalam gerak langkah pembangunan. Pandangan demikian membuat keraguan terhadap pembangunan sektor pendidikan sebagai pondasi bagi kemajuan pembangunan. Ketidakyakinan tersebut terwujud dalam komitmen anggaran yang kecil untuk sektor pendidikan. Cara pandang ini sekarang sudah mulai tergeser sejalan dengan ditemukannya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi pendidikan dalam pemahaman SDM sebagai kekuatan utama yaitu sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investment*) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Pidato Theodore Schultz pada tahun 1960 yang berjudul "*Investment in human capital*" di hadapan The American Economic Association merupakan peletak dasar teori human capital modern, dimana bahwa proses perolehan pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Schultz meneliti tentang Jerman dan Jepang, setelah Perang Dunia II kedua negara tersebut dapat pulih secara fantastis dari kehancuran skala besar jika dibandingkan dengan Britania Raya (Inggris), kesimpulannya adalah kecepatan pemulihan itu karena penduduk yang sehat dan terdidik dimana pendidikan membuat orang produktif dan layanan kesehatan yang baik menjaga pendidikan disekitarnya dan bisa produktif. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan

ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Para peneliti lainnya seperti Deninson (1962), Becker (1969) dan yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori human capital ini. Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi "*leading sector*" yang diwujudkan pada komitmen politik anggaran dimana anggaran pada sektor pendidikan tidak kalah dengan anggaran pada sektor lainnya.

Pada tahun 1970-an, penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sempat terhenti karena timbulnya keraguan mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Keraguan ini timbul, antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan diantaranya Gary Stanley Becker (1964) yang mengatakan bahwa teori *human capital* lebih menekankan dimensi material manusia sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio budaya. Kritik Becker ini justru membuka perspektif bahwa pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis saja, tetapi lebih dari pada itu dimensi sosial dan budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Hal ini dikarenakan pendidikan harus dilakukan oleh sebab terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (*human dignity*).

Penelitian Hick (1980), Wheeler (1980), dan beberapa peneliti neoklasik lain, telah dapat menyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung bahkan seluruh sektor pembangunan makro lainnya. Atas dasar

keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya ke berbagai negara. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya (Psacharopoulos, 1984). Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut.

Perekonomian Indonesia kembali bangkit setelah krisis tahun 1997 dengan melakukan dua upaya sekaligus secara simultan. Pertama, berusaha meningkatkan tahapan pembangunan ekonomi negara menuju ke tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Di lain pihak berusaha untuk menjaga stabilitas politik dan sosial agar perusahaan yang produktif dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua tujuan tersebut dapat dicapai melalui satu kebijakan dasar yaitu investasi yang besar dan berkelanjutan dalam pembangunan manusia.

Pengalaman negara-negara tetangga yang perekonomiannya tumbuh pesat, dapat dijadikan contoh bahwa dengan tenaga kerja yang tanggap dan berketrampilannya tinggi yang dapat bersaing dalam perekonomian global. Hal ini telah dibuktikan selama fase pembangunan industri sebelumnya yaitu pada saat perusahaan besar yang berorientasi ekspor hanya mempunyai relatif sedikit keterkaitan dengan usaha kecil dan menengah lokal yang semestinya memasok komponen-komponen atau barang setengah jadi. Pada industri elektronika dan farmasi misalnya, komponen impor mencapai 90% dari nilai ekspor. Sedangkan gejala yang sama juga terlihat pada produk yang lebih sederhana dimana mempunyai kandungan impor yang lebih tinggi seperti sepatu, 53%; pakaian, 49%; dan tekstil, 34%. Bahaya yang dihadapi pada fase

perkembangan industri selanjutnya adalah terus berlanjutnya proses ini, dan meninggalkan usaha kecil dan menengah jauh di belakang. Untuk dapat naik ke tingkat teknologi yang lebih tinggi diperlukan investasi yang lebih besar dalam bidang pendidikan. Setidaknya Indonesia harus berusaha untuk meningkatkan investasi dalam penyediaan Indonesia hanya menginvestasikan sekitar 1,4% dari PDBnya untuk pendidikan dibandingkan rata-rata dunia yang mencapai 4,8%.

Pembangunan SDM melalui pendidikan mendukung dan mendorong secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga pengeluaran untuk pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang produktif dan tidak semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang konsumtif tanpa manfaat balikan yang jelas (*rate of return*). Sejumlah hubungan telah diuji dalam rangka mencapai kesimpulan tersebut. Studi Bank Dunia mengenai 83 negara sedang berkembang menunjukkan bahwa di 10 negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan riil tertinggi dari GNP perkapita antara tahun 1960 dan 1977 adalah negara yang tingkat melek huruf pada tahun 1960 dengan rata-rata 16 persen lebih tinggi daripada negara-negara lain.

Selain itu juga digambarkan bahwa investasi dalam bidang pendidikan mempunyai pengaruh langsung terhadap produktivitas individu dan penghasilannya. Salah satu bukti yang terbanyak berasal dari sektor pertanian. Kajian antara petani yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan di negara-negara berpendapatan rendah menunjukkan bahwa ketika masukan-masukan seperti pupuk dan bibit unggul tersedia untuk teknik-teknik usaha tani yang lebih baik, hasil tahunan seorang petani yang berpendidikan selama 4 tahun rata-rata 13 persen lebih tinggi daripada seorang petani yang tidak berpendidikan. Meskipun masukan ini kurang,



penghasilan para petani yang berpendidikan tetap lebih tinggi 8 persen (World Bank, World Development Report, 1980).

Peranan wanita dalam mengasuh dan membesarkan anak ternyata juga dalam rangka peningkatan pendidikan anak di lingkungan keluarga sehingga pendidikan bagi anak perempuan menjadi sangat berarti ketika dikemudian hari mereka menjadi ibu. Studi-studi menunjukkan adanya korelasi signifikan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi anaknya dan angka harapan hidup. Lebih jauh, manfaat kesehatan dan gizi yang lebih baik dan tingkat fertilitas yang lebih rendah yang diakibatkan oleh investasi dalam pendidikan mendorong produktivitas investasi-investasi lainnya dalam sektor pembangunan lainnya. Sebuah studi lain dilakukan untuk Bank Dunia dan disajikan dalam World Development Report 1980, dimana dilakukan pengujian perkiraan tingkat pengembalian ekonomi (*rate of return*) terhadap investasi dalam bidang pendidikan di 44 negara sedang berkembang dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa nilai manfaat balikan pada semua tingkat pendidikan berada jauh di atas 10%.

### 3.1.5. PENDIDIKAN DI NEGARA BERKEMBANG

Permasalahan pendidikan di hampir semua negara berkembang umumnya sama, mulai dari persoalan biaya sekolah, buta huruf, putus sekolah, kurikulum hingga anggaran pendidikan (Harian Global 8 September 2007 oleh Ragimun). Sedangkan menurut Federal Ministry fo Economic Cooperation and Development, masalah-masalah bidang pendidikan di negara berkembang adalah sebagai berikut<sup>3</sup> :

#### a. Keterbatasan Dana

Di banyak negara berkembang, komitmen terhadap kemajuan pendidikan masih rendah yang tercermin pada

---

<sup>3</sup> , Education in Developing Countries, Federal Ministry fo Economic Cooperation and Development, 2007.

rata-rata pengeluaran di bidang pendidikan hanya sekitar 3,4 - 5,7 persen dari *Gross National Income* sedangkan di negara-negara Eropa Timur sekitar 8 persen. Struktur administrasi negara dan korupsi mempengaruhi sistem pendidikan di negara berkembang.

b. Jumlah Sekolah yang kurang

Di pelosok negara-negara berkembang, jarak tempuh yang sangat jauh menjadi kendala untuk mencapai sekolah. Hal ini menyebabkan orang tua murid dari siswa perempuan sangat mengkhawatirkan keselamatan anaknya sehingga tidak memperbolehkan mereka bersekolah. Selain masalah jarak, jumlah murid dalam satu kelas yang terlalu banyak juga menjadi masalah terutama di negara-negara Afrika, dimana 1 guru mengajar 70 murid.

c. Sarana dan Prasarana yang tidak memadai

Sekolah di negara berkembang sangat miskin untuk masalah peralatan seperti kurangnya buku teks dan peralatan mengajar yang sudah kuno. Banyak sekolah yang tidak dapat memenuhi biaya operasionalnya seperti membayar langganan daya dan jasa seperti air dan listrik serta sekolah tidak dapat memberikan sumbangan transport bagi muridnya. Hal ini tidak hanya terjadi pada tingkat sekolah dasar tapi juga terjadi pada tingkat perguruan tinggi atau universitas, dimana mereka tidak dapat membiayai penelitian para mahasiswa dan dosennya.

d. Kurangnya jumlah tenaga pengajar

UNESCO memperkirakan bahwa diperlukan lebih dari 35 juta guru tambahan di seluruh dunia. Di sisi lain, guru atau tenaga pengajar berkurang karena menjadi korban AIDS di negara-negara Afrika.

e. Kondisi tempat kerja yang tidak layak

Para guru di negara berkembang mendapatkan kondisi tempat kerja yang tidak layak. Mereka harus kerja dalam 2

atau 3 shift sehari dengan jumlah murid yang terlalu banyak dan gaji yang kecil sehingga mereka harus mencari pekerjaan sampingan agar pendapatan mereka bertambah. Selain itu mereka tidak mendapatkan pengetahuan tambahan seperti kursus dalam rangka peningkatan kualitas mengajar.

f. Biaya sekolah yang tinggi

Banyak orang yang tidak mampu untuk membayar buku dan peralatan belajar lainnya seperti seragam dan transport ke sekolah. Sementara hak manusia untuk mendapatkan pendidikan dasar gratis masih belum tercapai karena masih 101 negara yang memungut biaya sekolah. Hal ini menjadi penyebab anak-anak tidak bersekolah atau putus sekolah.

g. Diskriminasi terhadap anak perempuan

Perbedaan gender ternyata juga terjadi di dunia pendidikan terutama di negara-negara yang mempunyai budaya kuat terhadap anak laki-laki seperti Pakistan, India dan Bangladesh. Pernikahan dini dan kehamilan menjadi penyebab anak perempuan tidak bersekolah.

h. Tenaga kerja dibawah umur (anak-anak)

Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO), sekitar 186 juta anak-anak berusia antara 5-15 tahun bekerja hingga lebih dari 16 jam sehari. Di negara Afrika hampir setiap anak mempunyai tiga pekerjaan sedangkan di Asia, setiap anak mempunyai lima pekerjaan dan di Amerika Latin, setiap anak mempunyai enam pekerjaan. Banyak keluarga yang bergantung pada pendapatan anak untuk menambah pendapatan keluarga, sehingga anak-anak tidak mempunyai waktu untuk bersekolah karena mereka harus bekerja.

i. Konflik senjata

Sekitar 121 juta anak yang tidak bersekolah di seluruh dunia, 80 persen diantaranya hidup di negara yang terjadi konflik

senjata atau pasca perang. Di Rwanda, hampir 2/3 guru terbunuh dan di Mozambik, 45 persen sekolah hancur akibat perang sipil. Selain itu konflik senjata atau perang menimbulkan jumlah pengungsi yang meningkat yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.

### **3.2. PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pendidikan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Kebijakan ini dilakukan melalui peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk terutama penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memperoleh pendidikan. Oleh karena itu Pemerintah melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiah serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

#### **a. Pengertian BOS**

BOS yang dimaksud dalam PKPS-BBM Bidang Pendidikan ini, secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS

dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya non personil dan biaya investasi. Prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil dan bukan biaya untuk investasi. Dana BOS dari Pemerintah Pusat yang terbatas menyebabkan biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah.

b. Tujuan Program BOS

Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

c. Sasaran Program BOS

Sasaran dari program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP (negeri dan swasta) di seluruh propinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A, Paket B dan SMP Terbuka tidak termasuk sasaran PKPS-BBM bidang pendidikan, karena hampir semua komponen ketiga program tersebut telah dibiayai Pemerintah. Madrasah Diniyah juga tidak berhak memperoleh BOS karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yang telah menerima BOS.

d. Besaran Dana BOS

Besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :

- SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SD sebesar Rp. 235.000,-/siswa/tahun atau Rp. 19.500,-/siswa/bulan.

- SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/ Sekolah agama non Islam setara SMP sebesar Rp. 324.500,-/siswa/tahun atau Rp. 27.000,-/siswa/bulan.

### 3.2.1. KETENTUAN SEKOLAH PENERIMA BOS

#### 3.2.1.1. Sekolah Penerima BOS

- a. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS.

Khususnya sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.

- b. Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bilamana di sekolah terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin kelangsungan pendidikan kelangsungan siswa tersebut.

#### 3.2.1.2. Ketentuan yang harus diikuti sekolah penerima BOS

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis  
Bagi sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan gratis pada periode sebelumnya, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh peserta didik.

b. Sekolah yang telah menyelenggarakan pendidikan terbatas.

Bagi sekolah yang masih memungut pungutan/sumbangan/iuran pada periode sebelumnya yang dikarenakan terdapat selisih antara RABPS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dan BOS, sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut. Sisa dana BOS (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain.
2. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

### 3.2.2. MEKANISME PELAKSANAAN

#### 3.2.2.1. Mekanisme Alokasi Dana BOS

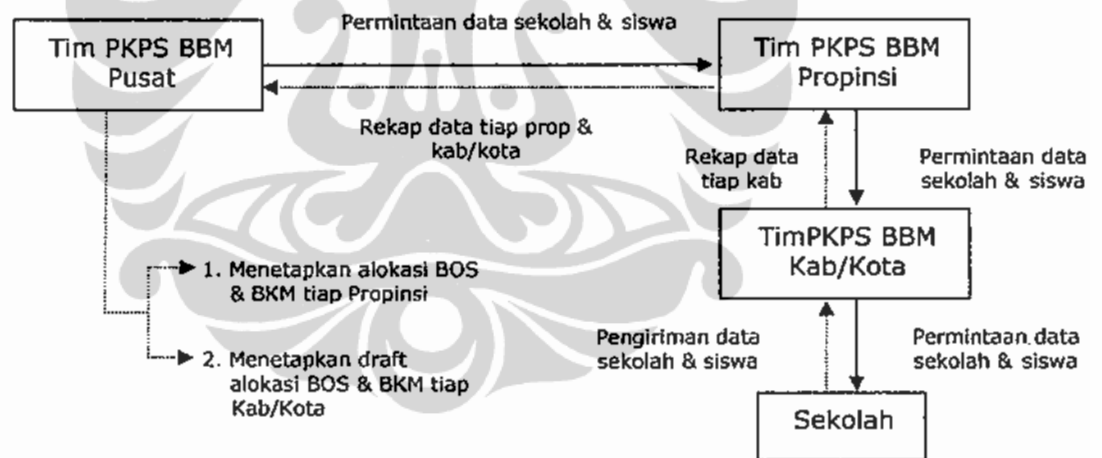
Pengalokasian jumlah sekolah penerima BOS dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim PKPS-BBM Pusat mengumpulkan data jumlah siswa per sekolah melalui Tim PKPS-BBM Propinsi dan Kabupaten/Kota (Bagan 3.1.), kemudian menetapkan alokasi BOS tiap propinsi.
- b. Atas dasar data jumlah siswa per sekolah, Tim PKPS-BBM Pusat membuat draft alokasi dana BOS tiap Kabupaten/Kota dan mengirimkan kepada tim PKPS-Propinsi dan Tim Kabupaten/Kota untuk diverifikasi, dengan melampirkan data jumlah siswa tiap sekolah di Kabupaten/Kota tersebut sebagai bahan acuan

Kabupaten/Kota dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.

- c. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, Kepala Kandepag Kab/Kota, dan Dewan Pendidikan dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
- d. Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS ke Tim PKPS-BBM Propinsi, tembusan ke Tim PKPS-BBM Pusat, dengan melampirkan daftar sekolah.

Bagan 3.1. Alur Pengiriman Data Jumlah Siswa



### 3.2.2.2. Mekanisme Penyaluran dan Pengambilan Dana BOS

#### a. Mekanisme Penyaluran Dana

##### 1. Syarat penyaluran dana BOS adalah :

- a). Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah, harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi).



- b). Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota.
- c). Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening Sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim PKPS-BBM Propinsi disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS (Bagan 3.2.).

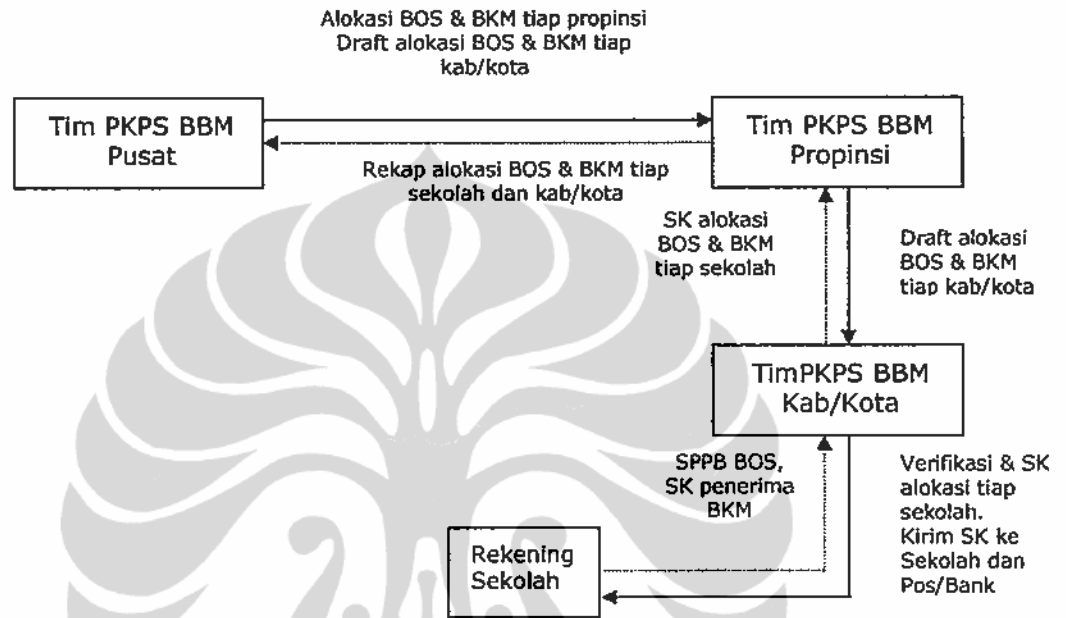
2. Penyaluran dana BOS :

Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Tingkat Propinsi melalui PT. Pos/Bank Pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut (Bagan 3.3.) :

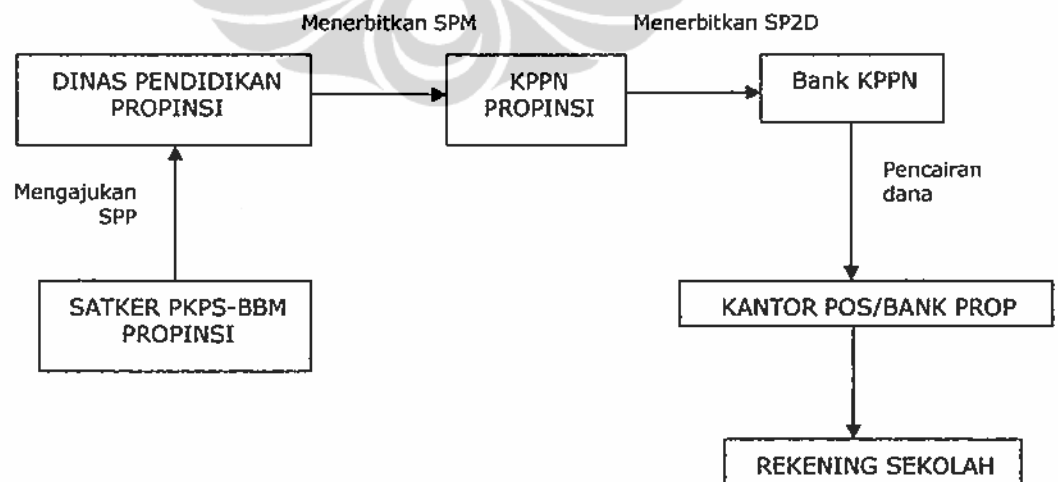
- a). Satker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.
- b). Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- c). Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi.
- d). KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekening Kas Negara.
- e). Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dengan Lembaga Penyalur (Pos/Bank).
- f). Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dan Sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera

dilaporkan kepada Kantor Pos/Bank bersangkutan dan Tim PKPS-BBM Propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.

Bagan 3.2. Alur Alokasi dan Seleksi



Bagan 3.3. Mekanisme Penyaluran Dana BOS



b. Mekanisme Pengambilan Dana

1. Tim PKPS-BBM Propinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada Kantor Pos/Bank Pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana.
2. Selanjutnya Kantor Pos/Bank yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah dan masuk dalam pos penerimaan di dalam RAPBS.
3. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan.
4. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim PKPS-BBM Kab/Kota dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
5. Apabila dana BOS belum diambil oleh sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan maka Kantor Pos/Bank bersangkutan akan mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.

3.2.3. PENGGUNAAN DANA BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah/madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah, yang harus terdaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (block grant, hasil unit produksi, sumbangan lain dsb). Khusus untuk pesantren Salafiyah, penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Penanggungjawab Program dengan Pengasuh Pondok Pesantren dan disetujui oleh Kasi PEKA PONTREN (Pendidikan

Keagamaan dan Pondok Pesantren) Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

Bagi sekolah agama non Islam, dalam penggunaan dana persetujuan dari Kasi PEMBIMAS (Pembimbing Masyarakat) Departemen Agama Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya Komite Sekolah/Madrasah atau Pengasuh Pondok Pesantren serta Kasi PEKA PONTREN dan Kasi PEMBIMAS dalam fungsinya sebagai lembaga yang menjadi mitra Kepala Sekolah berkaitan dengan pengelolaan dana BOS disebut sebagai Komite Sekolah.

a. Dana BOS digunakan untuk :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru : biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang.
2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku penunjang untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Membeli bahan-bahan habis pakai yang digunakan untuk bahan pendukung belajar mengajar dan kebutuhan sehari-hari sekolah.
4. Membiayai kegiatan kesiswaan.
5. Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
6. Pengembangan Profesi Guru.
7. Membayar biaya perawatan sekolah.
8. Membayar langganan daya dan jasa seperti listrik, air dan telepon sekolah.
9. Membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau Daerah.
10. Memberi bantuan siswa miskin untuk biaya transportasi.
11. Biaya Asrama/Pondokan/alat ibadah bagi santri salafiyah.

12. Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS.

13. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan meubelair sekolah.

b. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk :

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membayar bonus, transportasi atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
4. Membangun gedung/ruangan baru.
5. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
6. Menanamkan saham.
7. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah.

#### 3.2.4. ORGANISASI PELAKSANA

a. Tingkat Pusat

1. Organisasi

- a). Tim Pelindung, terdiri dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
- b). Penanggungjawab, terdiri dari Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas dan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Depag.
- c). Pelaksana

Tim PKPS-BBM Tingkat Pusat yang terdiri dari unsur Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama

d). Struktur Pelaksana

- 1). Ketua Satker PKPS-BBM (dari Depdiknas)
- 2). Bendahara (dari Depdiknas)
- 3). Seksi Data (1 dari Depdiknas dan 1 dari Depag)
- 4). Seksi BKM (1 dari Depdiknas dan 1 dari Depag)
- 5). Seksi Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/Salafiyah setara SD (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag)
- 6). Seksi Bantuan Operasional Sekolah SMP/MTs/ Salafiyah setara SMP (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag)
- 7). Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah (2 dari Depdiknas dan 2 dari Depag)
- 8). Seksi Publikasi/Humas (1 dari Depdiknas dan 1 dari Depag)

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim PKPS-BBM Pusat

- a). Menyusun rancangan program
- b). Menetapkan alokasi dana dan sasaran tiap propinsi
- c). Menetapkan draft alokasi tiap kabupaten/kota
- d). Merencanakan dan melakukan sosialisasi program
- e). Mempersiapkan dan melatih tim PKPS-BBM propinsi
- f). Melakukan penyusunan, penggandaan dan penyebaran buku petunjuk pelaksanaan program
- g). Menyusun standarisasi sistem database
- h). Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- i). Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

- j). Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim PKPS-BBM Propinsi atau Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota
- k). Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada instansi terkait

## b. Tingkat Propinsi

### 1. Organisasi

- a). Pelindung : - Gubernur
- b). Pengarah : - Ketua Bappeda Propinsi
- c). Penanggungjawab
  - 1). Kepala Dinas Pendidikan Propinsi
  - 2). Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil Depag)
- d). Pelaksana

Tim PKPS-BBM Tingkat Propinsi yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Propinsi dan Kanwil Depag
- e). Struktur Pelaksana
  - 1). Ketua Satker PKPS-BBM (dari Dinas Pendidikan Propinsi)
  - 2). Bendahara (dari Dinas Pendidikan Propinsi)
  - 3). Seksi Pendataan (1 dari Subdin Program Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
  - 4). Seksi BKM (1 dari Subdin yang menangani SMA/SMK Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
  - 5). Seksi Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/Salafiyah setara SD (1 dari Subdin yang menangani SD Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
  - 6). Seksi Bantuan Operasional Sekolah SMP/MTs/ Salafiyah setara SMP (1 dari Subdin yang menangani SMP Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)

- 7). Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)
- 8). Seksi Publikasi/Humas (1 dari Dinas Pendidikan dan 1 dari Kanwil Depag)

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim PKPS-BBM Propinsi

- a). Menetapkan alokasi bantuan tiap kabupaten/kota
- b). Mempersiapkan sekretariat dan perlengkapannya di propinsi
- c). Mempersiapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan
- d). Merencanakan dan melakukan sosialisasi program di tingkat propinsi
- e). Mempersiapkan dan melatih Tim PKPS-BBM Kab/Kota
- f). Melakukan pendataan penerima bantuan
- g). Menyalurkan dana sosialisasi, operasional dan monev ke Tim PKPS-BBM Kab/Kota
- h). Menyalurkan dana PKPS-BBM ke sekolah penerima BOS dan siswa penerima BKM
- i). Berkoordinasi dengan lembaga penyalur dan Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana
- j). Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- k). Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- l). Bertanggungjawab terhadap kasus penyimpangan penggunaan dana di tingkat propinsi
- m). Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBM Pusat dan instansi terkait
- n). Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBD sesuai yang tercantum dalam UU No.20 tahun 2003.



### c. Tingkat Kabupaten/Kota

#### 1. Organisasi

- a). Pelindung : - Bupati/Walikota
- b). Pengarah : - Ketua Bappeda Kab/Kota
- c). Penanggungjawab, terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota.

#### d). Pelaksana

Tim PKPS-BBM Tingkat Kab/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota

#### e). Struktur Pelaksana

- 1). Manager PKPS-BBM (dari Dinas Pendidikan Kab/Kota)
- 2). Seksi Pendataan (1 dari Subdin Program Dinas Pendidikan Kab/Kota dan 1 dari Kantor Depag)
- 4). Seksi BKM (1 dari Subdin yang menangani SMA/SMK Dinas Pendidikan Kab/Kota dan 1 dari Kantor Depag)
- 5). Seksi Bantuan Operasional Sekolah SD/MI/Salafiyah setara SD (1 dari Subdin yang menangani SD Dinas Pendidikan Kab/Kota dan 1 dari Kantor Depag)
- 6). Seksi Bantuan Operasional Sekolah SMP/MTs/ Salafiyah setara SMP (1 dari Subdin yang menangani SMP Dinas Pendidikan Kab/Kota dan 1 dari Kantor Depag)
- 7). Seksi Monitoring & Evaluasi dan Penyelesaian Masalah (1 dari Dinas Pendidikan Kab/Kota dan 1 dari Kantor Depag)

#### 2. Tugas dan Tanggungjawab Tim PKPS-BBM Kab/Kota

- a). Menetapkan alokasi BOS dan BKM untuk setiap sekolah sesuai alokasi/kuota

- b). Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah penerima
- c). Melakukan pendataan sekolah di wilayahnya
- d). Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi dan lembaga penyalur yang ditunjuk serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana
- e). Mengumumkan nama sekolah beserta besar dana bantuan yang diterima
- f). Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi
- g). Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim PKPS-BBM Propinsi
- h). Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah dan lembaga penyalur
- i). Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- j). Bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kab/kota
- k). Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim PKPS-BBM Propinsi dan instansi terkait
- l). Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBD sesuai yang tercantum dalam UU No.20 tahun 2003

Struktur organisasi di tingkat Kabupaten/Kota yang diuraikan di atas adalah struktur minimum yang diperlukan. Bilamana Tim Kab/Kota dipandang perlu ditambah unsurnya, misalnya melibatkan aparat tingkat kecamatan, maka hal tersebut diperkenankan dengan konsekuensi pendanaannya berasal dari Pemda setempat.

#### d. Tingkat Sekolah

##### 1. Organisasi

- Penanggungjawab

- a). Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah
- b). Kepala Sekolah/Madrasah menunjuk guru/bendahara sekolah yang bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS di tingkat sekolah

2. Tugas dan Tanggungjawab Tim PKPS-BBM Kab/Kota

- a). Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan
- b). Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah
- c). Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
- d). Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim PKPS-BBM Kab/Kota
- e). Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dari sumber APBD sesuai yang tercantum dalam UU No.20 tahun 2003.

3.2.5. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Pengelolaan dana BOS baik di tingkat propinsi, Kabupaten/Kota maupun tingkat sekolah berpedoman pada ketentuan pembayaran atas dana APBN, ketentuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, ketentuan perpajakan dan ketentuan pembukuan keuangan negara.

a. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah

Pada tingkat sekolah, RAPBS disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Dewan Guru, Komite Sekolah/Madrasah dan Ketua Yayasan.

- b. Pengelolaan dana BOS berpedoman pada :
- Ketentuan pembayaran atas dana APBN
  - Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
  - Ketentuan perpajakan
  - Ketentuan pembukuan keuangan negara
- c. Pembukuan
- Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya dan setiap akhir bulan ditutup oleh Bendahara dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
- d. Bukti Pengeluaran
- Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah dan dibubuhi materai untuk nominal tertentu. Kuitansi harus jelas dan rinci sesuai dengan peruntukannya dan disetujui oleh Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara.
- e. Pelaporan
- Laporan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana BOS disampaikan setiap triwulan, semesteran dan tahunan. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana BOS harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Melampirkan bukti kuitansi pembayaran dan fotocopi bukti Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kas Negara melalui Kantor Pos/Bank Pemerintah setempat.
  2. Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya.
  3. Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya.

### 3.2.6. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi (monev) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan PKPS BBM berjalan

sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan, apa yang tidak/belum dikerjakan serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Misi dari Monev adalah untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Hasil monev ini dapat digunakan sebagai informasi umum pada instansi dan pihak terkait yang selanjutnya bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dan bahan informasi dalam pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan program.

Pelaksanaan Monev dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pengelola program (internal) atau dilaksanakan oleh pihak luar (eksternal). Monev yang dilakukan oleh pihak internal berfungsi sebagai pembinaan dan untuk evaluasi diri, sedangkan monev yang dilakukan pihak eksternal berfungsi sebagai pengawasan dan menjamin akuntabilitas program. Internal monev dilakukan oleh pelaksana program di berbagai tingkatan, yaitu : Tingkat Pusat, Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Penanggung jawab monev adalah Satker PKPS-BBM di masing-masing tingkat yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Seksi Monev dan Penyelesaian Masalah Tingkat masing-masing tingkat. Eksternal monev dapat dilakukan oleh berbagai pihak antara lain :

- Tim Monitoring Independen : Perguruan Tinggi, DPR, BIN atau Tim Independen Khusus yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- Unsur masyarakat dari unsur Dewan Pendidikan, LSM, BMPS maupun organisasi masyarakat/kependidikan lainnya.
- Instansi Pengawasan : BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal dan Bawasda Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.

Sebelum pelaksanaan monev terlebih dahulu yang dilakukan adalah penetapan indikator kinerja. Keberhasilan suatu program diperlukan indikator-indikator kinerja dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program. Indikator-indikator kinerja program PKPS-BBM mencakup :

- a. Sosialisasi program
- b. Seleksi dan Alokasi
- c. Penyaluran dan Penyerapan Dana
- d. Pengambilan dan Pemanfaatan Dana
- e. Monitoring dan Evaluasi
- f. Adminstrasi dan Pelaporan
- g. Unit Pengaduan Masyarakat

Indikator kinerja pada Buku Panduan BOS yang dikeluarkan oleh Depdiknas berdasarkan jenis dan aspek yang dinilai dapat dilihat pada Lampiran 2. Selanjutnya berdasarkan Lampiran 2 tersebut, dilakukan penilaian terhadap kinerja program yang ditinjau dari sisi input, proses, output, outcome dan impact seperti pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Aspek dan Penilaian Kinerja Program BOS

ASPEK	HASIL PENILAIAN	NILAI
Input	Memadai	3
	Kurang Memadai	2
	Tidak Memadai	1
Proses	Sesuai	3
	Kurang Sesuai	2
	Tidak Sesuai	1
Output	Tercapai	3
	Tercapai sebagian	2
	Tidak tercapai	1
Outcome	Meningkat	3
	Tetap	2
	Menurun	1
Impact	Positif	3
	Tidak ada	2
	Negatif	1

Sumber : Buku Panduan BOS

Jika indikator-indikator tersebut belum dapat diukur dengan jelas maka perlu diturunkan kembali dalam bentuk sub indikator untuk masing-masing aspek. Pemilihan aspek atau jenis kegiatan (indikator) disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing<sup>4</sup>.



---

<sup>4</sup> Buku Panduan BOS, hal. 119.

## **BAB IV**

### **METODOLOGI DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. METODOLOGI PENELITIAN**

##### **4.1.1. Sumber Data**

Data yang digunakan pada tesis ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui kuesioner yang diisi oleh para responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui pihak kedua baik melalui Suku Dinas Pendidikan Dasar (Sudin Dikdas) Kotamadya Jakarta Timur maupun Tim PKPS BBM- Kabupaten/Kota Jakarta Timur.

Penelitian pada tesis ini dimulai pada pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Sudin Dikdas Kotamadya Jakarta Timur dan Tim PKPS-BBM Jakarta Timur. Data tersebut berupa nama-nama sekolah penerima dana BOS, jumlah dana BOS yang disalurkan di masing-masing sekolah dasar penerima dana BOS, penggunaan dana BOS di setiap sekolah berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing sekolah dan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran dana. Data sekunder tersebut merupakan karakteristik masing-masing sekolah dasar sampel. Setelah itu dilakukan pengumpulan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada orang tua murid pada sekolah sampel. Data yang diharapkan diperoleh melalui kuesioner tersebut adalah data mengenai pendidikan orang tua murid, frekuensi rapat sosialisasi dan penggunaan dana BOS, tingkat transparansi penggunaan dana BOS, jumlah spp/iuran yang masih dipungut/sukarela. Data primer tersebut merupakan karakteristik orang tua murid masing-masing sekolah dasar sampel.

##### **4.1.2. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Sampling Random Bertingkat (*Stratified*



*Sampling*). Teknik ini disebut juga teknik *sampling* berlapis dimana digunakan apabila populasinya heterogen atau terdiri atas kelompok-kelompok yang bertingkat. Penentuan tingkat berdasarkan karakteristik tertentu. Keuntungannya dari teknik ini adalah anggota sampel yang diambil lebih representatif. Kelemahannya adalah lebih banyak memerlukan usaha pengenalan terhadap karakteristik populasinya.

Sampel yang diambil adalah sebanyak 30 sekolah dasar dari 10 (sepuluh) kecamatan yang terdapat di Kotamadya Jakarta Timur, dimana untuk masing-masing kecamatan terdiri dari 3 (tiga) sekolah sampel yaitu sekolah percontohan, sekolah negeri dan sekolah swasta. Nama Sekolah Sampel dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini.

Tabel 4.1. Nama Sekolah Sampel

NO	KECAMATAN	SEKOLAH PERCONTOHAN	SEKOLAH NEGERI	SEKOLAH SWASTA
1	CIRACAS	Cibubur 11	Ciracas 17	SDI Yayasan Suci
2	CIPAYUNG	Pondok Ranggon 01	Cipayung 03	Nusa Melati
3	KRAMAT JATI	Dukuh 09	Cawang 01	SDI Teladan YPKUI
4	PASAR REBO	Pekayon 11	Cijantung 08	Kartika XI-1
5	DUREN SAWIT	Pondok Kelapa 10	Pondok Bambu 15	Strada Van-Lith
6	MAKASAR	Makasar 06	Cipinang Melayu 05	Angkasa I
7	JATINEGARA	Cipinang Cempedak 02	Cipinang Besar Utara 05	Kartika X-1
8	CAKUNG	Ujung Menteng 04	Jatinegara 04	Al-Akhyar
9	MATRAMAN	Utan Kayu Selatan 27	Utan Kayu Selatan 09	Muhammadiyah 3
10	PULOGADUNG	Kayu Putih 09	Cipinang 01	At-Taubah

#### 4.1.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui :

##### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota Jakarta Timur mengenai pelaksanaan

monitoring yang dilakukan dan pelaksanaan penyaluran dana BOS ke sekolah dasar penerima.

Program BOS dicanangkan pada Juli 2005. Pemberian dana BOS adalah setiap 2 (dua) bulan berdasarkan mekanisme penyaluran dana BOS. Semenjak diberikan dana BOS sampai dengan wawancara dilakukan, monitoring pelaksanaan dana BOS telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Periode I : bulan Juli - Desember 2005
- Periode II : bulan Januari - Juni 2006
- Periode III : bulan Juli - Desember 2006

## 2. Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan menyajikan pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner bertujuan untuk mengetahui : 1) karakteristik responden berupa tingkat pendidikan orang tua; 2) pengetahuan orang tua tentang program BOS, yang terdiri dari : a) informasi tentang BOS; b) frekuensi sosialisasi dana BOS; c) tingkat kejelasan sosialisasi program BOS; d) penggunaan dana BOS; e) tingkat transparansi penggunaan dana BOS dan; d) partisipasi dan unit pengaduan masyarakat. Kuesioner ini ditujukan kepada orang tua murid sekolah dasar yang terpilih sebagai sampel. Jumlah responden pada penelitian ini adalah 90 (sembilan puluh) responden orang tua murid, dimana dari 1 (satu) sekolah sampel terdiri dari 3 (tiga) responden yang merupakan ketua komite sekolah/anggota komite sekolah/wakil koordinator kelas dan orang tua murid.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dipakai pada penelitian ini adalah dokumentasi yang tercetak, yaitu : data dari Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota Jakarta Timur dan data dari Sudin

Dikdas Kotamadya Jakarta Timur yang dapat dilihat pada Lampiran 3 pada penelitian ini.

#### 4.1.4. Tahap-tahap Penelitian

##### 4.1.4.1. Pengkategorian Sekolah

###### 1. Penetapan Indikator Kinerja

Sebelum melakukan analisis regresi logistik pada software SPSS maka tahap pertama yang dilakukan setelah semua data terkumpul adalah mengkategorikan sekolah ke dalam dua kategori, yaitu (1) sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS dan; (2) sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Pengkategorian tersebut dilakukan berdasarkan nilai dari pengukuran kinerja dari pelaksanaan program BOS di masing-masing sekolah sampel.

Indikator kinerja program BOS berdasarkan Buku Panduan BOS dari Depdiknas yang dapat dilihat pada Lampiran 2, memperlihatkan bahwa penilaian keberhasilan program BOS tidak melihat dari output keberhasilan masing-masing sekolah, akan tetapi lebih dilihat pada output pelaksanaan program BOS sebagai salah satu dari program yang dilaksanakan oleh Depdiknas. Hal ini dapat dilihat pada aspek output, yaitu penyaluran dana dengan target keberhasilan adalah tepat waktu dan tepat jumlah. Jika dilihat dari sisi Depdiknas, penyaluran dana merupakan variabel output sedangkan jika dilihat dari sisi sekolah maka penyaluran dana merupakan aspek input yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BOS. Sedangkan untuk aspek outcome, peneliti tidak memasukkan variabel tersebut karena baru dapat terlihat perubahannya 5 (lima) tahun setelah program BOS dilaksanakan. Aspek impact jika dilihat kembali untuk indikator dan target yang ditetapkan, sebagai contoh, indikator UAN sebagai aspek output dengan target apabila

meningkat maka program BOS dikatakan berhasil atau dengan kata lain jika target berhasil dicapai maka program BOS dikatakan berhasil. Peneliti menilai bahwa jika nilai UAN meningkat tidak hanya dipengaruhi oleh adanya program BOS saja. Oleh karena itu, berdasarkan analisis tersebut maka peneliti menetapkan indikator kinerja untuk menilai keberhasilan program BOS dilihat dari output keberhasilan sekolah seperti pada Tabel 1.3, yaitu :

- **Persentase penyerapan dana**

Tingginya persentase penyerapan dana mencerminkan penggunaan dana yang optimal sesuai kebutuhan sekolah berdasarkan Juklak.

- **SPP/iuran**

Ada atau tidaknya SPP/iuran mencerminkan bahwa kebutuhan operasional sekolah sudah tercukupi atau belum dari besaran dana BOS yang diberikan untuk masing-masing sekolah meskipun dana BOS bukan bertujuan untuk menghilangkan SPP/iuran.

- **Peningkatan prasarana dan sarana (prasna)**

Penggunaan dana BOS salah satunya untuk peningkatan prasna sekolah, seperti meubelair, alat peraga dan lain-lain.

- **Pembiayaan kegiatan kesiswaan**

Penggunaan dana BOS salah satunya untuk pembiayaan kegiatan kesiswaan seperti kegiatan ekstrakurikuler.

**2. Penilaian kinerja sesuai indikator.**

Langkah selanjutnya setelah indikator kinerja ditetapkan adalah melakukan penilaian terhadap kinerja program BOS. Penilaian berdasarkan indikator tersebut dapat dilihat pada Lampiran 4.

### 3. Kategori Sekolah berdasarkan penilaian kinerja.

Setelah penilaian dilakukan maka selanjutnya adalah mengkategorikan masing-masing sekolah berdasarkan nilai yang diperoleh. Buku Panduan BOS tidak mencantumkan dengan pasti mengenai ketentuan nilai yang diperoleh. Berdasarkan Tabel 1.3. nilai maksimum yang diperoleh dari indikator kinerja adalah 4, maka peneliti menetapkan kategori sekolah dengan membagi sekolah berdasarkan nilai yang diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai yang diperoleh 0 – 2 maka masuk pada kategori 0;
- b. Nilai yang diperoleh 3 – 4 maka masuk pada kategori 1.

Kategori 0 merupakan kategori sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS sedangkan kategori 1 merupakan kategori sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Pengkategorian sekolah ini dilakukan untuk mengolah data selanjutnya yaitu sebagai variabel dependen pada analisis regresi logistik dengan software SPSS.

Hasil perhitungan penilaian sekolah sampel pada Lampiran 4, maka terdapat 23 sekolah dengan kategori 1, yaitu sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS dan 7 sekolah dengan kategori 0, yaitu sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Adapun sekolah dasar dengan kedua kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2. dibawah ini.

Tabel 4.2. Kategori Sekolah Dasar Sampel

Sekolah Dasar dalam pelaksanaan BOS			
No.	Berhasil (Kategori 1)	No.	Tidak Berhasil (Kategori 0)
1	Cibubur 11	1	SDI Suci
2	Ciracas 17	2	SDIT YPKUI
3	Pondok Ranggon 01	3	Strada Van Lith
4	Cipayung 03	4	Al-Akhyar
5	Nusa Melati	5	Muhammadiyah 3
6	Dukuh 09	6	Cipinang 01
7	Cawang 01	7	At-Taubah
8	Pekayon 11		
9	Cijantung 08		
10	Kartika XI-1		
11	Pondok Kelapa 10		
12	Pondok Bambu 15		
13	Makasar 06		
14	Angkasa I		
15	Cipinang Melayu 05		
16	Cipinang Cempedak 02		
17	Cipinang Besar Utara 05		
18	Ujung Menteng 04		
19	Kartika X		
20	Jatinegara 04		
21	Utun Kayu Selatan 27		
22	Utun Kayu selatan 09		
23	Kayu Putih 09		

4. Memilih/menetapkan variabel-variabel bebas

Sebelum analisis diskriminan dilakukan terlebih dahulu dipilih/ditetapkan variabel-variabel yang akan dimasukkan sebagai variabel-variabel bebas pada analisis tersebut. Pemilihan/penetapan variabel-variabel bebas ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU mengenai pelaksanaan program BOS. Variabel-variabel bebas tersebut adalah :

a. Frekuensi sosialisasi program BOS

Sebagian besar komite sekolah dan orang tua murid mendapat sosialisasi program BOS dari sekolah pada saat rapat orang tua yang biasanya diadakan diawal

tahun ajaran baru. Dari hasil Penelitian Lembaga Penelitian SMERU tentang pelaksanaan program BOS bahwa tidak dilibatkannya komite sekolah sebagai perwakilan orang tua murid sejak awal mengakibatkan pelaksanaan BOS tidak maksimal karena minimnya peran serta mereka dalam pengelolaan Program BOS. Sehingga sosialisasi program BOS sangat mempengaruhi keberhasilan program BOS itu sendiri.

b. Tingkat transparansi penggunaan dana

Selain frekuensi sosialisasi yang dihadiri oleh orang tua murid, tingkat transparansi penggunaan dana BOS juga mempengaruhi keberhasilan program BOS. Hal ini disebabkan bahwa penggunaan dana BOS harus diketahui oleh orang tua murid sehingga dapat diketahui apakah penggunaan dana BOS sesuai dengan Juklak. Laporan penggunaan dana BOS dapat dilakukan baik melalui komite sekolah maupun disampaikan pada acara sosialisasi program BOS.

c. Dana BOS

Di hampir semua sekolah sampel yang dilakukan Lembaga Penelitian SMERU (2006) menunjukkan bahwa dana BOS meningkatkan jumlah penerimaan dana sekolah. Bagi sekolah yang memiliki jumlah murid yang banyak, peningkatan jumlah penerimaan dana cukup signifikan. Terutama pada sekolah yang sebelumnya mengenakan iuran sekolah lebih rendah dari dana BOS. Dana BOS meningkatkan penerimaan dana sekolah hingga 20 kali lipat pada sekolah sampel yang sebelumnya mengenakan iuran sekolah antara Rp. 1.000 – Rp. 5.000 per bulan<sup>1</sup>. Semakin banyak jumlah murid penerima dana BOS maka semakin banyak dana BOS yang diperoleh sekolah tersebut sehingga

<sup>1</sup> Dampak Program BOS terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Sekolah serta Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan, Lembaga Penelitian SMERU, hal. 13, Jakarta, 2006.

pemanfaatan dana tersebut akan lebih banyak digunakan untuk operasional sekolah sesuai dengan Juklak Penggunaan BOS. Sehingga jumlah dana BOS mempengaruhi keberhasilan BOS di setiap sekolah.

d. Tingkat Pendidikan Orang Tua

Berkaitan dengan sosialisasi program BOS dan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah yang sebelumnya atas persetujuan orang tua murid, sehingga pendidikan orang tua sangat penting dalam memahami mekanisme dan peraturan penggunaan dana BOS serta sebagai fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program BOS. Berdasarkan hal tersebut maka tingkat pendidikan orang tua murid dimasukkan sebagai variabel bebas yang mempengaruhi keberhasilan program BOS.

e. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP/iuran)

Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP/iuran) sebagai indikator pengukur kinerja program BOS karena dinilai berpengaruh dalam tingkat keberhasilan program BOS. Tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan dan sejak lama mereka telah memberikan bantuan dan berpartisipasi langsung dalam pendanaan pendidikan.

Wujud partisipasi masyarakat yang terungkap dalam kajian cepat Lembaga Penelitian SMERU terhadap program BOS, antara lain berupa sumbangan orang tua murid kepada pihak sekolah, baik secara rutin (bulanan) maupun setiap tahun ajaran baru. Sampai saat ini, sebagian besar sekolah masih memperoleh bantuan dana rutin dari orang tua yang sering disebut sebagai SPP atau iuran BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan) atau uang komite sekolah yang dibayar setiap bulan. Dana sumbangan tersebut digunakan



untuk membiayai pemeliharaan gedung sekolah dan operasional lainnya. Dengan adanya SPP atau iuran lainnya menunjukkan bahwa dana BOS tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah meskipun menambah jumlah penerimaan sekolah. Artinya sekolah yang masih memungut SPP/iuran menunjukkan bahwa program BOS tidak berhasil dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah.

f. Ketepatan waktu pemberian dana BOS dan ketepatan jumlah dana BOS yang diberikan

Pemberian dana BOS yang tepat waktu dan tepat jumlah akan mempengaruhi pelaksanaan program BOS di masing-masing sekolah, dimana sekolah mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditentukan. Sebagai contoh, untuk pembiayaan langganan daya dan jasa (air, listrik, telpon) dan pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang harus dibayar tiap bulannya. Pemberian dana BOS yang tidak tepat waktu dan tepat jumlah dinilai bahwa pemberian dana BOS tersebut tidak efisien dan tidak efektif.

Setelah pengkategorian sekolah dan penetapan variabel-variabel bebas telah dilakukan, maka analisis diskriminan dapat dilakukan.

#### 4.1.4.2. Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik pada dasarnya hampir sama dengan analisis diskriminan, perbedaannya adalah pada analisis diskriminan perlu memakai asumsi *multivariate normal distribution* sedangkan asumsi ini tidak perlu dipenuhi pada analisis regresi logistik. *Multivariate normal distribution* tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan

campuran antara variabel kontinu (metrik) dan kategorikal (non-metrik).

Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Imam Ghazali, 2005). Pada penelitian ini analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui probabilitas sekolah dikategorikan sebagai sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS berdasarkan variabel-variabel bebas yang telah dipilih/ditetapkan. Nachrowi (2002) mendefinisikan probabilitas terjadinya peristiwa dalam bentuk logit adalah sebagai berikut :

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}}$$

dan

$$1 - P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} = \frac{e^{-Z_i}}{1 + e^{-Z_i}}$$

Sehingga rasio antara  $P_i$  dan  $1 - P_i$  adalah :

$$\frac{P_i}{1 - P_i} = \frac{\left[ \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} \right]}{\left[ \frac{e^{-Z_i}}{1 + e^{-Z_i}} \right]} = \frac{1}{e^{-Z_i}} = e^{-Z_i} = e^{\beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2}}$$

Angka yang didapat tersebut disebut odds atau disebut juga resiko, yaitu perbandingan antara probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan probabilitas tidak terjadinya suatu peristiwa. Makin besar nilai odd maka semakin besar peluang atau probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Bila p kecil sekali, maka 1-p dekat dengan 1. Akibatnya oddnya mendekati nol. Sebaliknya, jika p dekat dengan 1, maka 1-p

mendekati 0. Dengan kata lain odd adalah suatu indikator kecenderungan probabilitas terjadinya suatu peristiwa terjadi. Ringkasnya, jika odd mendekati 0 berarti kecenderungan probabilitas terjadinya suatu peristiwa terjadi sangat kecil sekali.

Jika odd di log kan, akan di dapat log odd sebagai berikut :

$$\ln \left[ \frac{P_i}{1 - P_i} \right] = Z_i = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n$$

L disebut log odd.

Dari log odds diatas dapat diamati dalam model, sebagai berikut :

- (i) L linier dalam  $X_i$ ;
- (ii) L juga linier dalam  $\beta_1 + \beta_2$ ;
- (iii) L disebut model logit;
- (iv) Karena p terletak antara 0 (nol) dan 1(satu), L terletak antara  $-\infty$  dan  $\infty$
- (v) Meskipun linier dalam  $X_i$ , tetapi p tidak linier dalam  $X_i$ ;
- (vi)  $\beta_2$  menyatakan perubahan dalam L bila  $X_i$  berubah 1 (satu) unit,  $\beta_2$  menunjukkan bagaimana log odds jika faktor-faktor yang diteliti berubah 1 (satu) unit.  $\beta_1$  menyatakan log odds pada saat faktor-faktor yang diteliti sama dengan nol;
- (vii) Jika diketahui misal tingkat faktor-faktor yang diteliti, katakanlah  $X_1, \dots, X_n$ , kita dapat menghitung probabilitas sekoiah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS.

Model probabilitas linier kemudian didefinisikan kembali menjadi fungsi distribusi logistik atau model logit :

$$P_i = E (Y_i = 1 \mid X_i) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_1 + \beta_2 X_i)}}$$

atau :

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} \quad ; \text{dimana : } Z_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1}$$

Dari model logistik tersebut dapat diamati :

- (i)  $P_i$  terletak antara 0 dan 1, karena  $Z_i$  terletak antara  $-\infty$  dan  $\infty$ 
  - Jika  $Z \longrightarrow \infty$ , maka  $P_i \longrightarrow 1$
  - Jika  $Z \longrightarrow -\infty$ , maka  $P_i \longrightarrow 0$
- (ii)  $P_i$  mempunyai hubungan linier dengan  $Z_i$  artinya  $P_i$  tidak konstan seperti asumsi pada MPL (Model Probabilitas Linier).
- (iii) Secara keseluruhan, model logit adalah model non linier, baik dalam parameter maupun dalam variabel. Oleh karena itu, metode OLS tidak dapat digunakan untuk mengestimasi model logit.

Secara umum model logit pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$P_i = E(Y_i = 1 | X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \beta_4 X_{i4} + \beta_5 X_{i5} + \beta_6 X_{i6} + \beta_7 X_{i7} + \varepsilon$$

atau :

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-Z_i}} \quad ; \text{dimana : } Z_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \beta_4 X_{i4} + \beta_5 X_{i5} + \beta_6 X_{i6} + \beta_7 X_{i7} + \varepsilon$$

dimana :

- $P_i$  : Peluang sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS
- $X_{i1}$  : frekuensi sosialisasi
- $X_{i2}$  : transparansi
- $X_{i3}$  : dana BOS masing-masing sekolah (per bulan)
- $X_{i4}$  : tingkat pendidikan orang tua murid
- $X_{i5}$  : spp/iuran
- $X_{i6}$  : ketepatan waktu pemberian dana BOS ke sekolah
- $X_{i7}$  : ketepatan jumlah dana BOS yang diberikan ke sekolah
- $\varepsilon$  : error
- $\beta$  : koefisien regresi

Ada dua metode untuk membuat fungsi logistik, yaitu :

a. *Direct method*

Pendekatan ini meliputi estimasi koefisien fungsi dimana seluruh variabel bebas (predictor) terlibat secara simultan bersama-sama tanpa memperhitungkan kemampuan membedakan antar kelompok.

b. *Stepwise method*

Variabel bebas diikutsertakan secara berurutan (*sequentially*), didasarkan pada kemampuannya untuk membedakan antar kelompok. Pendekatan ini tepat jika penelitian akan melakukan seleksi variabel-variabel yang mana saja yang kemampuan membedakannya memang tinggi.

Setelah metode pengolahan fungsi logistik dipilih dan hasil pengolahan SPSS didapat, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis output SPSS tersebut, yaitu :

a. Menilai Model Fit

Menilai model fit dapat dilihat pada output SPSS, antara lain :

1. Nilai statistik  $-2\text{LogL}$

Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesakan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi  $-2\text{LogL}$  yang juga disebut likelihood ratio  $\chi^2$  statistics dimana  $\chi^2$  distribusi dengan degree of freedom  $n-q$ , q adalah jumlah parameter dalam model. Output SPSS memberikan dua nilai  $-2\text{LogL}$ , yaitu satu untuk model yang hanya memasukkan konstanta dan satu untuk model dengan konstanta dan variabel. Statistik  $-2\text{LogL}$  dapat juga digunakan untuk menentukan jika variabel bebas ditambahkan ke dalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit. Selisih  $-2\text{LogL}$  untuk model dengan konstanta saja dan  $-2\text{LogL}$  untuk model dengan konstanta dan variabel

didistribusikan sebagai  $\chi^2$  dengan df (selisih df kedua model). Jika terjadi selisih penurunan nilai  $-2\text{LogL}$  lebih besar dari tabel maka dapat dikatakan bahwa selisih penurunan  $-2\text{LogL}$  tersebut signifikan. Hal ini berarti penambahan variabel independen ke dalam model memperbaiki model fit.

## 2. Nilai Cox & Snell R Square

Cox & Snell R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R square pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan.

## 3. Nilai Nagelkerke's R Square

Nilai Nagelkerke's R Square dapat diinterpretasikan seperti pada nilai R square di *multiple regression*. Nilai Nagelkerke's R Square merupakan variabilitas variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen.

### b. Menghitung nilai estimasi

Menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan nilai estimasi yang salah (*incorrect*) sehingga diketahui persentase ketepatan klasifikasi baik untuk masing-masing kategori maupun secara keseluruhan yang dapat dilihat pada output SPSS Classification Table.

### c. Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Estimasi parameter dan interpretasinya dapat dilihat pada output SPSS Variable in the Equation. Pada langkah/step terakhir akan diketahui variabel-variabel apa saja yang signifikan untuk membentuk persamaan regresi logistik. Interpretasi yang dilakukan adalah dengan melihat koefisien dari masing-masing variabel yang signifikan. Jika koefisiennya bernilai positif maka semakin tinggi variabel

signifikan tersebut akan meningkatkan probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Jika koefisiennya bernilai negatif maka semakin tinggi variabel signifikan akan menurunkan probabilitas terjadinya suatu peristiwa.

## 4.2. GAMBARAN SAMPEL

4.2.1. Data yang diperoleh dari kuesioner adalah sebagai berikut :

### a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden untuk tingkat pendidikan adalah sebagian besar merupakan tamatan SMA, yaitu sebesar 55,6%. Kemudian diikuti oleh tamatan SMP sebesar 14,4%, tamatan SD sebesar 12,2%, tamatan D3 dan tamatan S1 masing-masing sebesar 7,8% dan tamatan D2 dan tamatan S2 masing-masing sebesar 1,1%.

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tamat SD	11	12.2
2	Tamat SMP	13	14.4
3	Tamat SMA	50	55.6
4	Tamat D2	1	1.1
5	Tamat D3	7	7.8
6	Tamat S1	7	7.8
7	Tamat S2	1	1.1
		90	100

### b. Pengetahuan Orang Tua tentang Program BOS

Hasil kuesioner menyatakan bahwa orang tua murid mendapat informasi tentang BOS pertama kali adalah melalui media elektronik sebesar 60%, dari Sekolah sebesar 34,4% dan dari media cetak sebesar 5,6%. Berdasarkan data tersebut media elektronik merupakan media paling efektif dalam melakukan sosialisasi tentang program BOS.

Tabel 4.4. Media Informasi Program BOS

No	Sumber	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Media Elektronik	54	60
2	Media Cetak	5	5.6
3	Sekolah	31	34.4
4	Lainnya	0	0
		90	100

c. Frekuensi Sosialisasi

Frekuensi sosialisasi yang dihadiri oleh para responden adalah sebanyak 1 kali dengan persentase sebesar 63,3% dan bahkan belum pernah dilakukan sama sekali persentasenya mencapai 18,9%. Sedangkan para responden yang lebih dari 1 kali menghadiri sosialisasi program BOS adalah sebanyak 17,8%.

Tabel 4.5. Frekuensi Sosialisasi Program BOS

No	Frekuensi Sosialisasi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tidak pernah	17	18.9
2	1 kali	57	63.3
3	> 1 kali	16	17.8
		90	100

d. Sosialisasi Program BOS

Sosialisasi program BOS di sekolah hampir seluruh responden menyatakan bahwa yang melakukan sosialisasi di sekolah adalah Kepala Sekolah, sedangkan di beberapa sekolah yang melakukan sosialisasi adalah Kepala Sekolah beserta Dewan Guru dan Komite Sekolah.

e. Pemanfaatan Dana BOS

Sebagian besar sekolah sampel sudah tidak memungut spp/iuran tapi masih ada sekolah yang masih memungut spp/iuran baik yang jumlahnya ditetapkan oleh sekolah ataupun yang bersifat sukarela yang diberikan oleh para orang tua ke



sekolah. Pemanfaatan dana BOS sebagian besar telah digunakan sesuai dengan Juklak, hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner.

f. Tingkat Transparansi Penggunaan Dana BOS

Dari 90 responden orang tua murid menyatakan bahwa tingkat transparansi penggunaan dana BOS adalah cukup transparan yaitu sebesar 37.8%.

Tabel 4.6. Tingkat Transparansi Penggunaan Dana BOS

No	Tingkat Transparansi	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Transparan	20	22.3
2	Transparan	19	21.1
3	Cukup Transparan	34	37.8
4	Kurang Transparan	11	12.2
5	Tidak Transparan	3	3.3
6	Sangat Tidak Transparan	3	3.3
		90	100

g. Unit Pengaduan Masyarakat

Partisipasi dan unit pengaduan masyarakat dari hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari 90 responden hampir semuanya tidak pernah melakukan pengaduan terhadap pelaksanaan BOS dan unit pengaduan masyarakat tidak ada di seluruh sekolah sampel. Partisipasi yang dilakukan oleh para orang tua lebih bersifat materiil atau uang sebagai wujud kepedulian kepada sekolah.

4.2.2. Data sekolah sampel yang diperoleh dari Sudin Dikdas Kotamadya Jakarta Timur dan Tim Monitoring PKPS-BBM Kab/Kota Jakarta Timur berdasarkan Lampiran 3 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah siswa penerima dana BOS adalah berkisar antara 112 siswa – 621 siswa atau rata per sekolah adalah 375,4 siswa. Jumlah siswa penerima dana BOS terkecil adalah SDI Teladan YPKUI, yaitu sebanyak 112 siswa dan jumlah

siswa penerima dana BOS terbanyak adalah SDN Pondok Kelapa 10 Pagi, yaitu sebanyak 621 siswa.

- b. Dana BOS yang diterima sekolah berkisar antara Rp. 2.184.000,- - Rp. 12.109.500,-. Dana BOS ini dihitung berdasarkan jumlah siswa penerima dana BOS dikalikan indeks dana BOS/bulan/siswa untuk sekolah dasar, yaitu Rp. 19.500,-.
- c. Penerimaan dana BOS tepat waktu terjadi pada 18 sekolah dasar (60%), sedangkan 12 sekolah dasar lainnya (40%) menerima dana BOS tidak tepat waktu. Meskipun 60% sekolah dasar sampel telah menerima dana BOS tepat waktu, tidak dapat dikesampingkan bahwa 40% sekolah dasar yang tidak menerima dana BOS tepat waktu merupakan hal yang sepele. Hal ini dapat dikarenakan belum tepatnya mekanisme yang dijalankan oleh pihak sekolah atau pihak lainnya dalam pelaksanaan pemberian dana BOS sehingga perlu ditelusuri akar permasalahannya. Jika mekanisme belum dilakukan sesuai prosedur yang benar maka hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat pemahaman pihak sekolah atau lainnya dalam pelaksanaan program BOS ini.
- d. Ketepatan jumlah dana BOS berdasarkan SK Alokasi BOS terjadi pada 15 sekolah dasar, sedangkan 15 sekolah dasar lainnya menerima jumlah dana BOS tidak tepat sesuai SK Alokasi BOS. Berdasarkan mekanisme yang tercantum pada Buku Panduan BOS, pihak Sudin Dikdas menerima data jumlah siswa penerima BOS dari pihak sekolah meskipun kesalahan ini bisa saja terjadi pada kedua belah pihak.
- e. Data tentang penyerapan dana diperoleh berdasarkan laporan keuangan yang dikirimkan masing-masing sekolah dasar sampel ke Sudin Dikdas Kotamadya Jakarta Timur. Berdasarkan data pada Sudin Dikdas Kotamadya Jakarta Timur, ternyata tidak semua sekolah dasar penerima dana

BOS mengirimkan laporan keuangan sehingga perlu dilakukan monitoring yang lebih intensif dalam rangkaantisipasi penggunaan dana BOS yang tidak sesuai peraturan.

### 4.3. HASIL ANALISIS REGRESI LOGISTIK

Metode yang digunakan untuk membentuk fungsi logistik pada tesis ini adalah *stepwise method*. Setelah hasil pengolahan SPSS didapat (Lampiran 5), maka langkah selanjutnya adalah menganalisis output SPSS tersebut, yaitu :

a. Menilai Model Fit

1. Nilai statistik -2LogL

Nilai -2LogL untuk model yang hanya memasukkan konstanta adalah sebesar 32.596 dan nilai -2LogL untuk model model dengan konstanta dan variabel adalah sebesar 17.540 dan memiliki distribusi  $\chi^2$  dengan df 28 (30-2) dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Iteration History I

Iteration History a,b,c,d,e

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients		
		Constant	SPP	PDK
Step 1	25.697	1.575	-.017	
1	24.994	2.002	-.021	
	24.979	2.076	-.022	
	24.979	2.076	-.022	
	24.979	2.076	-.022	
Step 2	21.433	-2.762	-.017	.380
2	18.339	-5.751	-.024	.713
	17.609	-8.027	-.030	.966
	17.540	-8.957	-.032	1.071
	17.540	-9.070	-.032	1.084
	17.540	-9.071	-.032	1.084
	17.540	-9.071	-.032	1.084

- a. Method: Forward Stepwise (Conditional)
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 32.596
- d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.
- e. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

Selisih -2LogL untuk model dengan konstanta saja dan -2 LogL untuk model dengan konstanta dan variabel adalah 15.057 (Tabel 4.8) dengan  $df = 2$  (angka dari tabel adalah 4.3027), maka terjadi selisih penurunan nilai -2LogL lebih besar dari tabel maka dapat dikatakan bahwa selisih penurunan -2LogL tersebut signifikan. Hal ini berarti penambahan variabel independen ke dalam model memperbaiki model fit.

## 2. Nilai Cox & Snell R Square

Nilai Cox & Snell R Square pada output SPSS adalah 0.395 yang besarnya kurang dari 1 (satu) yang dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.8. Omnibus Tests of Model Coefficients I

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	7.618	1	.006
	Block	7.618	1	.006
	Model	7.618	1	.006
Step 2	Step	7.439	1	.006
	Block	15.057	2	.001
	Model	15.057	2	.001

Tabel 4.9. Model Summary I

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	24.979 <sup>a</sup>	.224	.338
2	17.540 <sup>b</sup>	.395	.596

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

b. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

## 3. Nilai Nagelkerke's R Square

Nilai Nagelkerke's R Square pada output SPSS Tabel 4.9. adalah 0.596, yang berarti variabilitas variabel dependen

yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 59.6%.

b. Menghitung nilai estimasi

Tabel 4.10. Classification Table I

Observed		Predicted		
		HASIL		Percentage Correct
		0	1	
Step 1	HASIL 0	3	4	42.9
	HASIL 1	1	22	95.7
Overall Percentage				83.3
Step 2	HASIL 0	5	2	71.4
	HASIL 1	1	22	95.7
Overall Percentage				90.0

a. The cut value is .500

Output SPSS Classification Table (Tabel 4.10) terlihat bahwa pada step 2, menurut prediksi sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan BOS (kategori 0) adalah 7 sekolah sedangkan hasil observasi hanya 5 sekolah sehingga ketepatan klasifikasinya adalah 71.4%. Sedangkan menurut prediksi sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan BOS (kategori 1) adalah 23 sekolah sedangkan hasil observasi hanya 22 sekolah sehingga ketepatan klasifikasinya adalah 95.7% atau secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah 90.0%.

c. Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Tabel 4.11. Variabel in the Equation I

Step	Variable	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1	SPP	-.022	.010	5.185	1	.023	.978		
	Constant	2.078	.644	10.415	1	.001	7.989	.959	.997
Step 2	PDK	1.084	.516	4.405	1	.036	2.956	1.074	8.134
	Constant	-.032	.013	6.297	1	.012	.968	.944	.993
		-9.071	5.020	3.265	1	.071	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: SPP.

b. Variable(s) entered on step 2: PDK.

Output SPSS Variable in the Equation (Tabel 4.11) pada step 2 terdapat 2 (dua) variabel independen yang signifikan, yaitu pendidikan orang tua murid dan SPP/iuran. Berdasarkan Variable in the Equation tersebut, maka persamaan regresi logistik dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Ln} \left[ \frac{P_i}{1 - P_i} \right] = -9.071 + 1.084 \text{ PDK} - 0.032 \text{ SPP}$$

atau

$$\begin{aligned} &= \frac{P_i}{1 - P_i} = e^{-9.071 + 1.084 \text{ PDK} - 0.032 \text{ SPP}} \\ &= e^{-9.071} \times e^{1.084 \text{ PDK}} \times e^{-0.032 \text{ SPP}} \end{aligned}$$

Variabel pendidikan orang tua murid dan SPP/iuran signifikan pada tingkat kepercayaan 5% ( $\alpha = 0.05$ ). Dari persamaan regresi logistik dapat dilihat bahwa log odds sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS secara positif dipengaruhi oleh pendidikan orang tua murid dan dipengaruhi secara negatif oleh SPP/iuran. Jika SPP/iuran dianggap konstan, maka odds sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS akan naik sebesar faktor 2.956 ( $e^{1.084}$ ) untuk setiap kenaikan satu tahun pendidikan orang tua murid. Jika PDK (pendidikan orang tua murid) dianggap konstan, maka odds sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS akan turun sebesar faktor 0.968 ( $e^{-0.032}$ ) untuk setiap kenaikan seribu rupiah SPP/iuran. Interpretasi juga dapat dilakukan dengan menyatakan bahwa semakin tinggi nilai PDK (pendidikan orang tua murid), maka probabilitas sekolah yang berhasil juga semakin tinggi dan semakin tinggi nilai SPP/iuran, maka probabilitas sekolah yang berhasil akan menurun.

Jika kita lakukan analisis regresi logistik untuk 90 responden dengan melihat variabel bebas PDK (pendidikan orang tua murid) sebagai variabel kategorikal dengan tingkat pendidikan dari tamatan SD sampai dengan SMA diberi kode 1 kemudian untuk tingkat pendidikan tamatan diatas SMA diberi kode 2 dengan menggunakan *direct method* maka hasilnya adalah sebagai berikut (Lampiran 6) :

a. Menilai Model Fit

1. Nilai statistik -2LogL

Nilai -2LogL untuk model yang hanya memasukkan konstanta adalah sebesar 97.789 dan nilai -2LogL untuk model model dengan konstanta dan variabel adalah sebesar 61.572 (Tabel 4.12).

Tabel 4.12. Iteration History II

Iteration History II

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients							
		Constant	FREK	TRNS2	DANA	SPP	T.Waktu	T.Jumlah	PDK
Step 1	68.549	-.781	.018	.008	.109	-.015	.339	.217	.546
1 2	62.450	-2.037	.082	.013	.177	-.020	.557	.396	1.122
3	61.605	-2.793	.174	.016	.206	-.022	.692	.507	1.467
4	61.572	-2.928	.220	.016	.211	-.023	.731	.531	1.550
5	61.572	-2.932	.224	.016	.212	-.023	.733	.532	1.552
6	61.572	-2.932	.224	.016	.212	-.023	.733	.532	1.552

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 97.789

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Selisih -2LogL untuk model dengan konstanta saja dan -2 LogL untuk model dengan konstanta dan variabel adalah 36.217 (Tabel 4.13) dengan df = 2 (angka dari tabel adalah 4.3027), maka terjadi selisih penurunan nilai -2LogL lebih besar dari tabel maka dapat dikatakan bahwa selisih penurunan -2LogL tersebut signifikan. Hal ini berarti penambahan variabel independen ke dalam model memperbaiki model fit.

2. Nilai Cox & Snell R Square

Nilai Cox & Snell R Square pada output SPSS adalah 0.331 yang besarnya kurang dari 1 (satu) yang dapat dilihat pada Tabel 4.14.

3. Nilai Nagelkerke's R Square

Nilai Nagelkerke's R Square pada output SPSS Tabel 4.14. adalah 0.500, yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen sebesar 50%.

Tabel 4.13. Omnibus Tests of Model Coefficients II

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	36.217	7	.000
	Block	36.217	7	.000
	Model	36.217	7	.000

Tabel 4.14. Model Summary II

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	61.572 <sup>a</sup>	.331	.500

<sup>a</sup>. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

d. Menghitung nilai estimasi

Tabel 4.15. Classification Table II

Classification Table

Observed		Predicted		
		HASIL		Percentage Correct
		0	1	
Step 1	HASIL 0	15	6	71.4
	1	3	66	95.7
Overall Percentage				90.0

<sup>a</sup>. The cut value is .500



Output SPSS Classification Table (Tabel 4.15) terlihat bahwa, menurut prediksi orang tua murid yang termasuk pada sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan BOS (kategori 0) adalah 21 orang tua murid sedangkan hasil observasi hanya 15 orang tua murid sehingga ketepatan klasifikasinya adalah 71.4%. Sedangkan menurut prediksi prediksi orang tua murid yang termasuk pada sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan BOS (kategori 1) adalah 69 orang tua murid sedangkan hasil observasi hanya 66 orang tua murid sehingga ketepatan klasifikasinya adalah 95.7% atau secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah 90.0%.

e. Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Tabel 4.16. Variabel in the Equation II

		Variables in the Equation					
Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
1	FREK	.224	.613	.133	1	.715	1.251
	TRNS2	.016	.020	.623	1	.430	1.016
	DANA	.212	.155	1.855	1	.173	1.236
	SPP	-.023	.008	8.472	1	.004	.977
	T.Waktu	.733	.751	.953	1	.329	2.081
	T.Jumlah	.532	.869	.375	1	.540	1.702
	PDK	1.552	1.072	2.094	1	.148	4.720
	Constant	-2.932	1.897	2.389	1	.122	.053

a. Variable(s) entered on step 1: FREK, TRNS2, DANA, SPP, T.Waktu, T.Jumlah, PDK.

Output SPSS Variable in the Equation (Tabel 4.16) variabel independen yang signifikan ( $\alpha=0.15$ ), yaitu PDK (pendidikan orang tua murid) dan SPP/iuran. Berdasarkan Variable in the Equation tersebut, maka persamaan regresi logistik dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\ln \left[ \frac{P_i}{1 - P_i} \right] = -2.932 + 1.552 \text{ PDK} - 0.023 \text{ SPP}$$

atau

$$\begin{aligned}
 &= \frac{P_i}{1 - P_i} = e^{-2.932 + 1.552 \text{ PDK} - 0.023 \text{ SPP}} \\
 &= e^{-2.932} \times e^{1.552 \text{ PDK}} \times e^{-0.023 \text{ SPP}}
 \end{aligned}$$

Dari persamaan regresi logistik dapat dilihat bahwa log odds orang tua murid yang termasuk pada sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS secara positif dipengaruhi oleh PDK dan dipengaruhi secara negatif oleh SPP/iuran. Jika SPP/iuran dianggap konstan, maka odds orang tua murid yang termasuk pada sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS akan naik sebesar faktor 4.721 ( $e^{1.552}$ ) untuk tingkat pendidikan orang tua murid diatas SMA (kode 2). Jika dana BOS dianggap konstan, orang tua murid yang termasuk pada sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS akan turun sebesar faktor 1.023 ( $e^{-0.023}$ ) untuk setiap kenaikan seribu rupiah SPP/iuran. Interpretasi juga dapat dilakukan dengan menyatakan bahwa pendidikan orang tua murid diatas SMA, maka probabilitas orang tua murid termasuk pada sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS juga semakin tinggi dibandingkan dengan pendidikan orang tua murid dibawah SMA dan semakin tinggi nilai SPP/iuran, maka probabilitas orang tua murid termasuk pada sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS akan menurun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan teori dan hasil pembahasan maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberhasilan pelaksanaan program BOS di Jakarta Timur berdasarkan sekolah dasar sampel adalah 76,7%, dimana dari 30 sampel sekolah dasar terdapat 23 sekolah yang termasuk dalam kategori sekolah yang berhasil dalam pelaksanaan program BOS.
2. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan bahwa faktor-faktor yang membedakan antara sekolah yang berhasil dan sekolah yang tidak berhasil dalam pelaksanaan program BOS adalah tingkat pendidikan orang tua murid dan spp/iuran.

#### **5.2. SARAN**

Dalam rangka peningkatan keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan program BOS maka penulis mengusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan frekuensi sosialisasi program BOS dalam rangka transparansi penggunaan dana BOS bagi seluruh orang tua murid terutama bagi sekolah-sekolah dimana tingkat pendidikan orang tua muridnya lebih rendah. Sosialisasi sebagai media komunikasi dan informasi antara sekolah dan orang tua murid merupakan hal yang seharusnya dilakukan terutama dalam rangka transparansi penggunaan dana BOS. Sosialisasi bertujuan agar orang tua murid mempunyai tingkat kesepahaman yang tinggi mengenai program BOS itu sendiri terutama tentang penggunaan dana BOS di sekolah. Berdasarkan hasil regresi logistik menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan orang tua murid maka semakin tinggi pula probabilitas suatu

sekolah berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Tingkat pendidikan orang tua mencerminkan suatu tingkat kesepahaman mengenai program BOS. Tingkat kesepahaman yang tinggi akan mendorong partisipasi para orang tua murid untuk memberikan saran positif dan memonitor terhadap penggunaan dana BOS di sekolah.

2. Perlu kiranya untuk mengkaji kembali terhadap indikator kinerja yang ditetapkan oleh Depdiknas yang tercantum pada Buku Panduan BOS, untuk menilai keberhasilan program BOS. Alangkah baiknya jika indikator kinerja tersebut lebih menekankan pada penilaian keberhasilan program BOS yang berlangsung di sekolah. Keberhasilan program BOS di sekolah tersebut dinilai dengan lebih mengarah kepada output yang dicapai oleh suatu sekolah sesuai penggunaan dana BOS yang ada dalam Juklak Pelaksanaan BOS bukan pada output pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Depdiknas saja.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah. 2006. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Departemen P dan K. , Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia. 1996.

Dillon, William R. And Goldstein, Matthew. 1984. *Multivariate Analysis : Methods and Applications*, John Wiley & Sons, Inc.

Gujarati, Damodar, 1999. *Ekonometrika Dasar*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Gujarati, Damodar. 1999. *Basic Econometrics*. Mc Graw Hill, Fourth Edition.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang.

Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. BPFE-Yogyakarta.

Mankiw, N. Gregory, 2003. *Teori Makroekonomi*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Pratama Rahardja dan Mandala Manurung. 2002. *Teori Ekonomi Mikro : Suatu Pengantar*. Lembaga Penerbit FEUI, Yakarta.

Santoso, Singgih. 2005. *Menggunakan SPSS untuk Statistik Multivariat*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Supranto. 2004. *Analisis Multivariat : Arti dan Interpretasi*. PT. Rineka Cipta. Cetakan Pertama, Jakarta.

Tjiptoherijanto, Priyono. 1996. *SDM dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penerbit FEUI.

Usman, Husnaini. 2006. *Pengantar Statistika*. Edisi Kedua. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Dokumen :

Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)



## LAMPIRAN 1

## I. DATA RESPONDEN

## A. ORANG TUA MURID

1. Nama Responden : .....
2. Usia : .....
3. Pendidikan (tamatan) : .....

## B. DATA ANAK/MURID

1. Nama anak : .....
2. Kelas : .....
3. Nama Sekolah : .....
4. Kecamatan Sekolah : .....

## II. PERTANYAAN

## A. PROGRAM SOSIALISASI DANA BOS

*(pilih salah satu dan lingkari serta lengkapi jawaban anda)*

1. Pertama kali anda memperoleh informasi tentang dana BOS dari ?
  - a. Media elektronik (TV/Radio dll)
  - b. Media Cetak (Koran/Majalah dll)
  - c. Sekolah
  - d. Lainnya, .....(sebutkan)
2. Berapa kali anda menghadiri program sosialisasi dana BOS di sekolah anak anda ? ..... kali
3. Siapakah yang melakukan sosialisasi tentang program BOS tersebut (jawaban boleh lebih dari satu) ?
  - a. Kepala Sekolah
  - b. Dewan Guru
  - c. Komite Sekolah
  - d. Tim dari Depdiknas (Tim PKPS-BBM Pusat)
  - e. Tim PKPS-BBM Propinsi atau Kab/Kota
  - f. Lainnya, ..... (sebutkan)
4. Bagaimana tingkat kejelasan mengenai sosialisasi yang dilakukan?
  - a. Sangat jelas
  - b. Jelas
  - c. Cukup jelas
  - d. Kurang jelas
  - e. Tidak jelas
  - f. Sangat tidak jelas

## B. PENGGUNAAN DANA BOS

*(pilih salah satu dan lingkari serta lengkapi jawaban anda)*

1. Apakah anda membayar untuk pendaftaran ?
  - a. Ya ( Rp. .... )
  - b. Tidak
2. Apakah anda membayar/membeli buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan ?
  - a. Ya ( Rp. .... )
  - b. Tidak



3. Apakah anda membayar untuk pemeliharaan/perawatan sekolah ?
  - a. Ya ( Rp. .... )
  - b. Tidak
4. Apakah anda membayar iuran sekolah setiap bulannya ?
  - a. Ya
    - Sebelum mendapat dana BOS ( Rp. .... )
    - Setelah mendapat dana BOS ( Rp. .... )
  - b. Tidak
5. Apakah anda membayar untuk ujian sekolah, ulangan umum, ulangan harian ?
  - a. Ya
    - Ujian sekolah ( Rp. .... )
    - Ulangan umum ( Rp. .... )
    - Ulangan harian ( Rp. .... )
  - b. Tidak
6. Apakah anda membayar untuk kegiatan kesiswaan (ekstrakurikuler/remedial/pengayaan) ?
  - a. Ya ( Rp. .... )
  - b. Tidak
7. Setelah mendapat dana BOS, apakah di sekolah tempat anak anda belajar terdapat meubelair/alat peraga yang baru sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar ?
  - a. Ya ( berupa ..... )
  - b. Tidak
8. Apakah penggunaan dana BOS di sekolah dirapatkan terlebih dahulu dengan orang tua murid ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
9. Apakah ada laporan penggunaan dana BOS dari sekolah kepada orang tua murid ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
10. Apakah indikator terpenting bagi anda dalam mengukur tingkat transparansi penggunaan dana BOS ?
  - a. Dilakukan rapat penggunaan dana BOS
  - b. Adanya laporan penggunaan dana BOS
  - c. Hasil nyata dari penggunaan dana BOS seperti pembelian buku teks dan buku penunjang untuk perpustakaan, perawatan sekolah, kegiatan kesiswaan dll
  - d. Lainnya (sebutkan) .....
11. Seberapa tinggi tingkat transparansi/keterbukaan menurut anda mengenai penggunaan dana BOS di sekolah anak anda ?
  - a. Sangat transparan
  - b. Transparan
  - c. Cukup transparan
  - d. Kurang transparan
  - e. Tidak transparan
  - f. Sangat tidak transparan



C. UNIT PENGADUAN MASYARAKAT

(pilih salah satu dan lingkari serta lengkapi jawaban anda)

1. Apakah di sekolah anak anda terdapat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) khususnya tentang BOS ?
  - a. Ada
  - b. Tidak ada  
(jika jawaban anda "tidak ada", maka anda tidak perlu menjawab pertanyaan selanjutnya)
2. Jika ada UPM, pernahkan anda memberikan kritik/saran/pengaduan ke UPM tentang BOS ?
  - a. Pernah
  - b. Tidak pernah  
(jika jawaban anda "tidak", maka anda tidak perlu menjawab pertanyaan selanjutnya)
3. Apakah kritik/saran/pengaduan anda ditindaklanjuti ?
  - a. Ya
  - b. Tidak  
(jika jawaban anda "tidak", maka anda tidak perlu menjawab pertanyaan selanjutnya)
4. Bagaimana tingkat kepedulian pihak sekolah untuk menyelesaikan kritik/saran/pengaduan yang disampaikan masyarakat/orang tua murid melalui UPM ?
  - a. Sangat peduli
  - b. Peduli
  - c. Cukup peduli
  - d. Kurang peduli
  - e. Tidak peduli
  - f. Sangat tidak peduli
5. Apakah bentuk penyelesaiannya ?
  - a. penjelasan
  - b. musyawarah
  - c. rapat
  - d. lainnya (sebutkan), .....



Lampiran 2. Indikator Kinerja

Aspek	Indikator	Target
Impact	Income/capita	Meningkat
	Angka Pengangguran	Menurun
	Kualitas SDM	Meningkat
Outcome	UAN	Meningkat
	Jumlah Siswa yang Mendaftar	Meningkat
	DO	Meningkat
Output	Penyaluran Dana	Tepat Waktu dan Tepat Jumlah
	Penyerapan Dana	100%
	Pengambilan Dana	Diterima yang berhak
	Pemanfaatan Dana	Sesuai Juklak
Proses	Seleksi dan Alokasi	Tepat sasaran
	UPM	Terselesaikan
	Administrasi Pelaksanaan	Tertib
	Administrasi Keuangan	Akuntabel, Transparan
	Workshop	Umpan Balik
Input	Sosialisasi/Pelatihan	Kualitas SDM Meningkatkan
	SDM	Memadai
	Organisasi/Manajemen	Optimal dan efektif
	Media Informasi	Dipahami
	Sarana Prasarana	Memadai
	Dana	Efektif, efisien

Lampiran 3. Data Sekolah Sampel

NO	NAMA SEKOLAH	Jumlah Siswa	Dana BOS yang diterima	Tepat Waktu	Tepat Jumlah	Penyerapan Dana
1	Cibubur 11	416	Rp 8,112,000	Ya	Ya	100%
2	Ciracas 17	336	Rp 6,552,000	Tidak	Tidak	100%
3	SDI Suci	187	Rp 3,646,500	Tidak	Tidak	100%
4	Pd.Rangon 01	489	Rp 9,535,500	Ya	Ya	100%
5	Cipayung 03	318	Rp 6,201,000	Ya	Ya	100%
6	Nusa Melati	441	Rp 8,599,500	Ya	Tidak	100%
7	Dukuh 09	330	Rp 6,435,000	Tidak	Tidak	100%
8	Cawang 01	300	Rp 5,850,000	Tidak	Ya	100%
9	SDIT.YPKUI	112	Rp 2,184,000	Tidak	Tidak	100%
10	Pekayon 11	365	Rp 7,117,500	Ya	Ya	100%
11	Cijantung 08	330	Rp 6,435,000	Tidak	Ya	100%
12	Kartika XI-1	596	Rp11,622,000	Tidak	Tidak	100%
13	Pd.Kelapa 10	621	Rp12,109,500	Ya	Ya	100%
14	Pd.Bambu 15	310	Rp 6,045,000	Ya	Tidak	100%
15	Strada Van Lith	565	Rp11,017,500	Tidak	Tidak	100%
16	Makasar 06	292	Rp 5,694,000	Ya	Ya	100%
17	Cip.Melayu 05	304	Rp 5,928,000	Ya	Tidak	100%
18	Angkasa I	545	Rp10,627,500	Ya	Ya	100%
19	Cip.Cempedak 02	385	Rp 7,507,500	Ya	Ya	100%
20	Cip.Bsr Utr 05	321	Rp 6,259,500	Ya	Tidak	100%
21	Kartika X-1	174	Rp 3,393,000	Tidak	Tidak	100%
22	Uj.Menteng 04	530	Rp10,335,000	Ya	Ya	100%
23	Jatinegara 04	360	Rp 7,020,000	Tidak	Tidak	100%
24	Al-Akhyar	175	Rp 3,412,500	Tidak	Tidak	100%
25	UK.Sitn 27	246	Rp 4,797,000	Ya	Ya	100%
26	UK.Sitn 09	272	Rp 5,304,000	Ya	Ya	100%
27	Mhmdyah 3	374	Rp 7,293,000	Ya	Tidak	100%
28	Kayu Putih 09	519	Rp10,120,500	Ya	Ya	100%
29	Ciplinang 01	530	Rp10,335,000	Ya	Ya	100%
30	At- Taubah	519	Rp10,120,500	Tidak	Tidak	100%

Sumber : Sudin Dikdas Kotamadya Jakarta Timur

Lampiran 4. Perhitungan Penilaian Sekolah Dasar Sampel

NO	NAMA SEKOLAH	Indikator Kinerja												Jumlah Nilai	Kategori
		Penyerapan Dana		SPP/luran		Peningkatan Sarana & Prasarana		Pembayaran Kegiatan							
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	Cibubur 11	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
2	Ciracas 17	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
3	SDI Suci	100%	1	Ada	0	Ada	1	Tidak	0	2	0	0			
4	Pd.Rangon 01	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
5	Cipayung 03	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
6	Nusa Melati	100%	1	Ada	0	Ada	1	Gratis	1	3	1	1			
7	Dukuh 09	100%	1	Ada	0	Ada	1	Gratis	1	3	1	1			
8	Cawang 01	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
9	SDIT. YPKUI	100%	1	Ada	0	Tidak	0	Tidak	0	1	0	0			
10	Pekayon 11	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
11	Ciantung 08	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
12	Kartika XI-1	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
13	Pd.Kelapa 10	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
14	Pd.Bambu 15	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
15	Strada Van Lith	100%	1	Ada	0	Tidak	0	Tidak	0	1	0	0			
16	Makasar 06	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
17	Cip.Melayu 05	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
18	Angkasa 1	100%	1	Ada	0	Ada	1	Gratis	1	3	1	1			
19	Cip.Cpdk 02	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
20	Cip.Bsr Ufr 05	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
21	Kartika X-1	100%	1	Ada	0	Ada	1	Gratis	1	3	1	1			
22	Uj.Menteng 04	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
23	Jatinegara 04	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
24	Al-Akhyar	100%	1	Ada	0	Tidak	0	Tidak	0	1	0	0			
25	UK.Sitn 27	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
26	UK.Sitn 09	100%	1	Tidak	1	Ada	1	Gratis	1	4	1	1			
27	Mhmdy 3	100%	1	Ada	0	Tidak	0	Tidak	0	1	0	0			
28	Kayu Putih 09	100%	1	Ada	0	Ada	1	Gratis	1	3	1	1			
29	Cipinang 01	100%	1	Tidak	1	Tidak	0	Tidak	0	2	1	0			
30	At-Taubah	100%	1	Ada	0	Tidak	0	Tidak	0	1	0	0			

Lampiran 5. Output SPSS Analisis Regresi Logistik (Stepwise Method)

**Logistic Regression**

**Case Processing Summary**

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	30	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	30	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		30	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

**Dependent Variable Encoding**

Original Value	Internal Value
0	0
1	1

**Block 1: Method = Forward Stepwise (Conditional)**

**Iteration History<sup>a,b,c,d,e</sup>**

Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients		
			Constant	SPP	PDK
Step 1	1	25.697	1.575	-.017	
	2	24.994	2.002	-.021	
	3	24.979	2.076	-.022	
	4	24.979	2.078	-.022	
	5	24.979	2.078	-.022	
Step 2	1	21.433	-2.762	-.017	.380
	2	18.339	-5.751	-.024	.713
	3	17.609	-8.027	-.030	.966
	4	17.540	-8.957	-.032	1.071
	5	17.540	-9.070	-.032	1.084
	6	17.540	-9.071	-.032	1.084
	7	17.540	-9.071	-.032	1.084

- a. Method: Forward Stepwise (Conditional)
- b. Constant is included in the model.
- c. Initial -2 Log Likelihood: 32.596
- d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.
- e. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

### Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	7.618	1	.006
	Block	7.618	1	.006
	Model	7.618	1	.006
Step 2	Step	7.439	1	.006
	Block	15.057	2	.001
	Model	15.057	2	.001

### Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	24.979 <sup>a</sup>	.224	.338
2	17.540 <sup>b</sup>	.395	.596

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

b. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than .001.

### Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	14.217	3	.003
2	4.163	7	.761

### Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		HASIL = 0		HASIL = 1		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	3	2.472	0	.528	3
	2	0	1.361	3	1.639	3
	3	1	.728	2	2.272	3
	4	2	.325	0	1.675	2
	5	1	2.114	18	16.886	19
Step 2	1	3	2.627	0	.373	3
	2	2	2.043	1	.957	3
	3	0	1.109	3	1.891	3
	4	1	.751	4	4.249	5
	5	1	.310	2	2.690	3
	6	0	.046	2	1.954	2
	7	0	.077	4	3.923	4
	8	0	.025	3	2.975	3
	9	0	.012	4	3.988	4

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed			Predicted		
			HASIL		Percentage Correct
			0	1	
Step 1	HASIL	0	3	4	42.9
		1	1	22	95.7
	Overall Percentage				83.3
Step 2	HASIL	0	5	2	71.4
		1	1	22	95.7
	Overall Percentage				90.0

a. The cut value is .500

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)		
							Lower	Upper	
Step 1	SPP	-.022	.010	5.185	1	.023	.978	.959	.997
	Constant	2.078	.644	10.415	1	.001	7.989		
Step 2	PDK	1.084	.516	4.405	1	.036	2.956	1.074	8.134
	SPP	-.032	.013	6.297	1	.012	.968	.944	.993
	Constant	-9.071	5.020	3.265	1	.071	.000		

a. Variable(s) entered on step 1: SPP.

b. Variable(s) entered on step 2: PDK.

**Correlation Matrix**

		Constant	SPP	PDK
Step 1	Constant	1.000	-.609	
	SPP	-.609	1.000	
Step 2	Constant	1.000	.594	-.988
	PDK	-.988	-.675	1.000
	SPP	.594	1.000	-.675

**Model if Term Removed<sup>a</sup>**

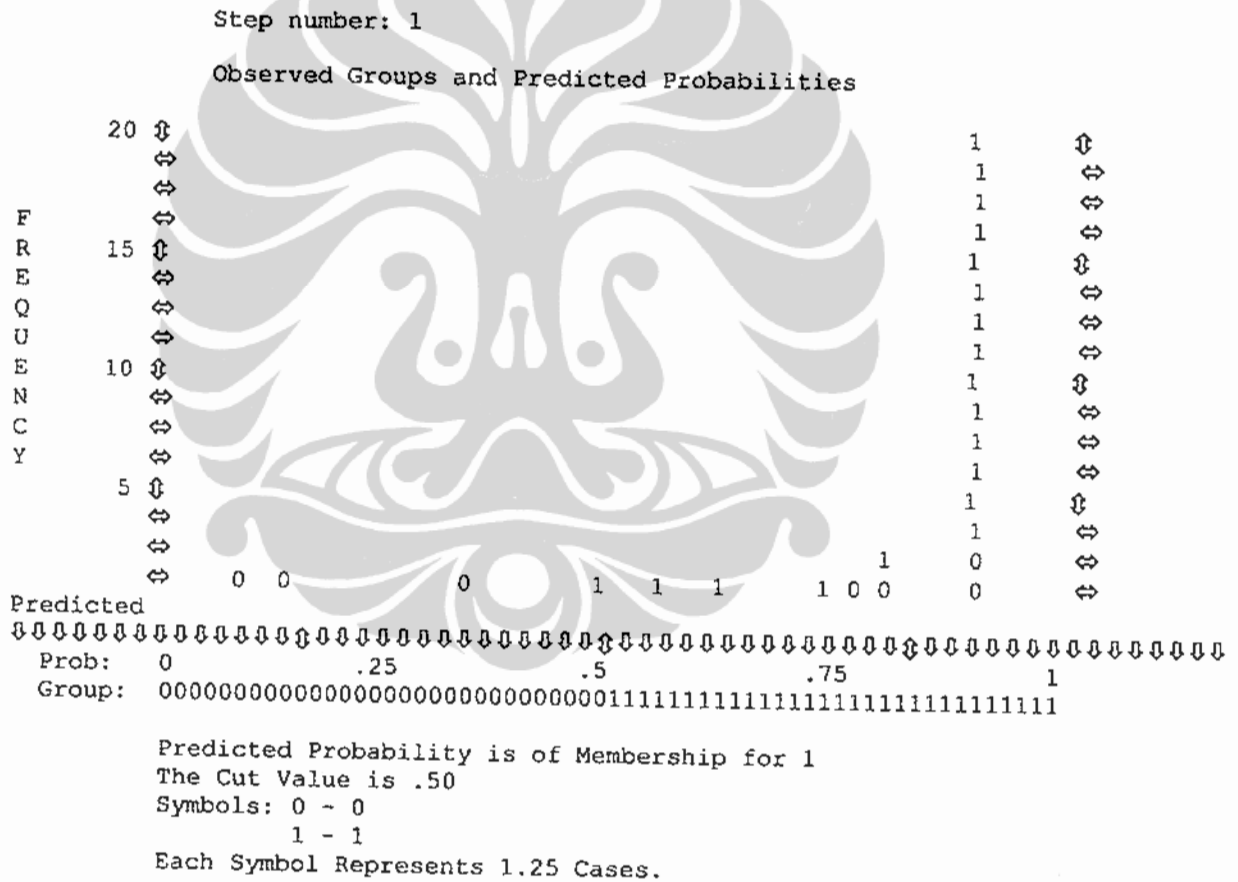
Variable	Model Log Likelihood	Change in -2 Log Likelihood	df	Sig. of the Change
Step 1 SPP	-16.298	7.618	1	.006
Step 2 PDK	-13.301	9.063	1	.003
SPP	-15.448	13.356	1	.000

a. Based on conditional parameter estimates

Variables not in the Equation

Step	Variables		Score	df	Sig.
Step 1	Variables	FREK	.474	1	.491
		TRNS2	.277	1	.599
		DANA	2.090	1	.148
		PDK	6.492	1	.011
		T.Waktu	2.024	1	.155
		T.Jumlah	1.711	1	.191
		Overall Statistics	8.830	6	.183
Step 2	Variables	FREK	.142	1	.706
		TRNS2	.247	1	.619
		DANA	1.396	1	.237
		T.Waktu	1.559	1	.212
		T.Jumlah	1.343	1	.247

a. Residual Chi-Squares are not computed because of redundancies.







Lampiran 6. Output SPSS Analisis Regresi Logistik (Direct Method)

**Logistic Regression**

**Case Processing Summary**

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	90	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	90	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		90	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

**Dependent Variable Encoding**

Original Value	Internal Value
0	0
1	1

**Block 1: Method = Enter**

**Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>**

Iteration	-2 Log Likelihood	Coefficients							
		Constant	FREK	TRNS2	DANA	SPP	T.Waktu	T.Jumlah	PDK
Step 1	68.549	-.781	.018	.008	.109	-.015	.339	.217	.546
1	62.450	-2.037	.082	.013	.177	-.020	.557	.396	1.122
	61.605	-2.793	.174	.016	.206	-.022	.692	.507	1.487
	61.572	-2.928	.220	.016	.211	-.023	.731	.531	1.550
	61.572	-2.932	.224	.016	.212	-.023	.733	.532	1.552
	61.572	-2.932	.224	.016	.212	-.023	.733	.532	1.552

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 97.789

d. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

	Chi-square	df	Sig.
Step 1 Step	36.217	7	.000
Block	36.217	7	.000
Model	36.217	7	.000

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	61.572 <sup>a</sup>	.331	.500

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than .001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	25.486	8	.001

Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test

		HASIL = 0		HASIL = 1		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	7	7.682	2	1.318	9
	2	8	5.455	1	3.545	9
	3	3	2.929	6	6.071	9
	4	0	1.626	9	7.374	9
	5	0	1.229	9	7.771	9
	6	0	.840	9	8.160	9
	7	0	.609	9	8.391	9
	8	1	.333	8	8.667	9
	9	2	.210	7	8.790	9
	10	0	.086	9	8.914	9

Classification Table<sup>a</sup>

Observed	HASIL	Predicted		Percentage Correct
		HASIL		
		0	1	
Step 1	HASIL	0	1	
		15	6	71.4
		3	66	95.7
	Overall Percentage			90.0

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

Step		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1	FREK	.224	.613	.133	1	.715	1.251
	TRNS2	.016	.020	.623	1	.430	1.016
	DANA	.212	.155	1.855	1	.173	1.236
	SPP	-.023	.008	8.472	1	.004	.977
	T.Waktu	.733	.751	.953	1	.329	2.081
	T.Jumlah	.532	.869	.375	1	.540	1.702
	PDK	1.552	1.072	2.094	1	.148	4.720
	Constant	-2.932	1.897	2.389	1	.122	.053

a. Variable(s) entered on step 1: FREK, TRNS2, DANA, SPP, T.Waktu, T.Jumlah, PDK.



## Logistic Regression

### Case Processing Summary

Unweighted Cases <sup>a</sup>		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	90	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	90	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		90	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

### Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
0	0
1	1

## Block 1: Method = Forward Stepwise (Conditional)

### Iteration History<sup>a,b,c,d</sup>

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients			
		Constant	SPP	DANA	
Step 1	77.114	1.574	-.017		
1	2	75.004	2.001	-.021	
	3	74.958	2.075	-.022	
	4	74.958	2.077	-.022	
	5	74.958	2.077	-.022	
	Step 2	72.277	.465	-.018	.160
2	2	68.096	.203	-.025	.278
	3	67.818	.066	-.027	.324
	4	67.816	.052	-.027	.329
	5	67.816	.052	-.027	.329

a. Method: Forward Stepwise (Conditional)

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 97.789

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	22.831	1	.000
	Block	22.831	1	.000
	Model	22.831	1	.000
Step 2	Step	7.142	1	.008
	Block	29.973	2	.000
	Model	29.973	2	.000

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	74.958 <sup>a</sup>	.224	.338
2	67.816 <sup>a</sup>	.283	.427

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	23.613	3	.000
2	38.285	8	.000

**Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test**

		HASIL = 0		HASIL = 1		Total
		Observed	Expected	Observed	Expected	
Step 1	1	9	7.409	0	1.591	9
	2	0	4.081	9	4.919	9
	3	5	2.634	6	8.366	11
	4	2	.308	0	1.692	2
	5	5	6.568	54	52.432	59
Step 2	1	6	7.467	3	1.533	9
	2	9	5.169	0	3.831	9
	3	3	2.542	7	7.458	10
	4	0	1.369	8	6.631	8
	5	0	1.120	9	7.880	9
	6	0	1.372	12	10.628	12
	7	0	.866	9	8.134	9
	8	0	.664	9	8.336	9
	9	3	.317	6	8.683	9
	10	0	.114	6	5.886	6

**Classification Table<sup>a</sup>**

Observed			Predicted		
			HASIL		Percentage Correct
			0	1	
Step 1	HASIL	0	9	12	42.9
		1	2	67	97.1
Overall Percentage					84.4
Step 2	HASIL	0	12	9	57.1
		1	3	66	95.7
Overall Percentage					86.7

a. The cut value is .500

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95.0% C.I. for EXP(B)		
							Lower	Upper	
Step 1	SPP	-.022	.006	15.550	1	.000	.978	.967	.989
	Constant	2.077	.372	31.232	1	.000	7.983		
Step 2	DANA	.329	.134	6.054	1	.014	1.389	1.069	1.805
	SPP	-.027	.006	19.575	1	.000	.973	.961	.985
	Constant	.052	.848	.004	1	.951	1.053		

a. Variable(s) entered on step 1: SPP.

b. Variable(s) entered on step 2: DANA.

**Correlation Matrix**

		Constant	SPP	DANA
Step 1	Constant	1.000	-.609	
	SPP	-.609	1.000	
Step 2	Constant	1.000	.137	-.887
	DANA	-.887	-.439	1.000
	SPP	.137	1.000	-.439

**Model if Term Removed<sup>a</sup>**

Variable	Model Log Likelihood	Change in -2 Log Likelihood	df	Sig. of the Change
Step 1 SPP	-48.895	22.831	1	.000
Step 2 DANA	-37.595	7.373	1	.007
SPP	-48.567	29.317	1	.000

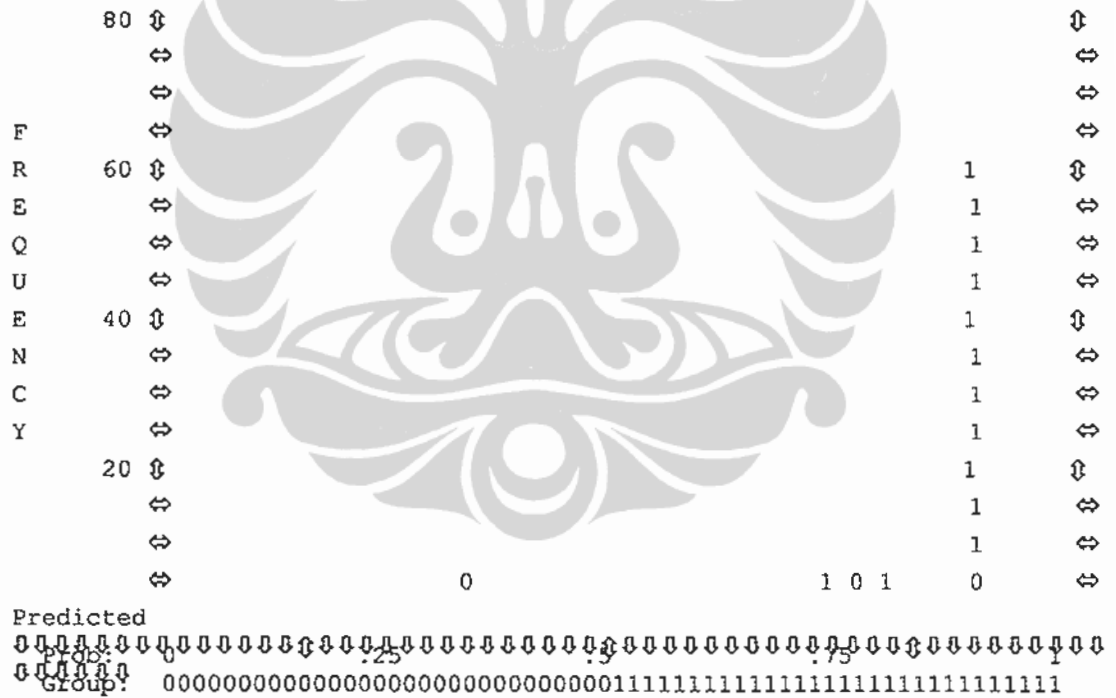
a. Based on conditional parameter estimates

**Variables not in the Equation**

Step	Variables		Score	df	Sig.
1		FREK	.995	1	.319
		TRNS2	2.735	1	.098
		DANA	6.627	1	.010
		T.Waktu	6.073	1	.014
		T.Jumlah	5.139	1	.023
		PDK	2.067	1	.150
	Overall Statistics		12.102	6	.060
2		FREK	1.408	1	.235
		TRNS2	1.568	1	.210
		T.Waktu	1.741	1	.187
		T.Jumlah	1.287	1	.257
		PDK	2.195	1	.138
		Overall Statistics		5.697	5

Step number: 1

**Observed Groups and Predicted Probabilities**



Predicted Probability is of Membership for 1  
 The Cut Value is .50  
 Symbols: 0 - 0  
 1 - 1  
 Each Symbol Represents 5 Cases.

